



**PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PERTUMBUHAN
EKONOMI DAN UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT
PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI BANTEN TAHUN 2020-2024**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*

Oleh:

ANGGI JULIA JOVITRA
NIM. 2130402011

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/1447H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggi Julia Jovitra

NIM : 2130402011

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020-2024”** adalah karya sendiri bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sumbernya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Agustus 2025

Saya yang Menyatakan,



Anggi Julia Jovitra
NIM. 2130402011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Anggi Julia Jovitra** Nim 2130402011 dengan judul **“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020-2024”** Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan sidang *Muqasamah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Agustus 2025

Ketua Program Studi,
Ekonomi Syariah



Dr. Novia Nengsih, M.A.Ek., CIFA
NIP. 199011042019032008

Pembimbing



Dr. Nasfizar Guspendri, SE., M.Si
NIP. 197508232003121004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Anggi Julia Jovitra**, NIM: 2130402011 dengan judul: **“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020-2024”** telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Nasfizar Guspendri, SE., M.Si NIP.197508232003121004	Ketua Sidang		25/8/2025
2.	Dr. Nil Firdaus, M.A NIP.198304222020121001	Penguji 1		25/8/2025
3.	Siska Febriyanti, S.Pd., M.Pd.E NIP.198702222025212006	Penguji 2		25/8/25

Batusangkar, 25 Agustus 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam,



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP.197310072002121001

ABSTRAK

Anggi Julia Jovitra, Nim 2130402011, Judul Skripsi: “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020-2024”. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Binsi Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tingginya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten, meskipun daerah ini memiliki posisi strategis, indeks pembangunan manusia terus meningkat, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, dan upah minimum mengalami kenaikan setiap tahun. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pembangunan ekonomi dan serapan tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2020–2024.

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder dalam bentuk data panel (*cross section* dan *time series*) yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Secara simultan, variabel IPM, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2020–2024.

Kata Kunci: Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum

ABSTRACT

Anggi Julia Jovitra, Nim: 2130402011, Thesis Title: *"The Effect of Human Development Index, Economic Growth, and Minimum Wage on the Open Unemployment Rate in Regencies/Cities of Banten Province in 2020–2024."* Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business, Mahmud Yunus State Islamic University of Batusangkar.

The main problem in this research is the high level of open unemployment in Banten Province, despite the region's strategic position, continuously increasing Human Development Index (HDI), positive trends in economic growth, and consistent annual increases in minimum wages. This phenomenon indicates an imbalance between economic development and labor absorption. Therefore, this study aims to analyze how the Human Development Index (HDI), economic growth, and minimum wage affect the open unemployment rate in the regencies/municipalities of Banten Province during the period 2020–2024.

This research employs a quantitative approach. The data used are secondary panel data (cross-section and time series) obtained from the publications of the Central Bureau of Statistics (BPS) of Banten Province. The data were analyzed using panel data regression with a Fixed Effect Model (FEM) approach.

The results of the study indicate that, partially, economic growth and minimum wages significantly influence the open unemployment rate. Meanwhile, the Human Development Index (HDI) does not significantly influence the open unemployment rate. Simultaneously, the HDI, economic growth, and minimum wages significantly influence the open unemployment rate in the regencies/cities of Banten Province from 2020 to 2024.

Keywords: Open Unemployment Rate, Human Development Index, Economic Growth, Minimum Wage

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Batasan Masalah.....	14
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian	15
F. Manfaat dan Luaran Penelitian	15
G. Definisi Operasional.....	16
BAB II KAJIAN TEORI	18
A. Landasan Teori.....	18
1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	18
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	28
3. Pertumbuhan Ekonomi	33
4. Upah Minimum.....	36
B. Kajian Penelitian yang Relevan	39
C. Kerangka Berpikir.....	44
D. Hipotesis	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Tempat dan Waktu Penelitian	46
C. Populasi dan Sampel	47
D. Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	58
B. Deskripsi Data.....	59
C. Hasil Analisis Data	64
D. Pembahasan	72
BAB V Penutup	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 TPT di Kabupaten/Kota Provinsi Banten	3
Tabel 1.2 IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Banten	5
Tabel 1.3 PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Banten	8
Tabel 1.4 Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Banten	11
Tabel 2.1 Persamaan Perbedaan Penelitian Ini dengan Penelitian Terdahulu	42
Tabel 3.1 Rancangan Waktu Penelitian	46
Tabel 3.2 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi	57
Tabel 4.1 Upah Mnimum Kabupaten/Kota Provinsi Banten	63
Tabel 4.2 Hasil Uji Chow	64
Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman	64
Tabel 4.4 Hasil Regresi Data Panel Model FEM.....	65
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas	66
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas	67
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	67
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi	68
Tabel 4.9 Hasil Uji T.....	70
Tabel 4.10 Hasil Uji F	71
Tabel 4.11 Hasil Analisis Determinasi.....	72

DAFTAR GAMBAR

Grafik 1.1 TPT di Indonesia dan Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa	2
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	45
Gambar 4.1 Peta Wilayah Provinsi Banten.....	58
Grafik 4.2 TPT di Kabupaten/Kota Provinsi Banten	60
Grafik 4.3 IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Banten	61
Grafik 4.4 PDRB ADHK di Kabupaten/Kota Provinsi Banten	62
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

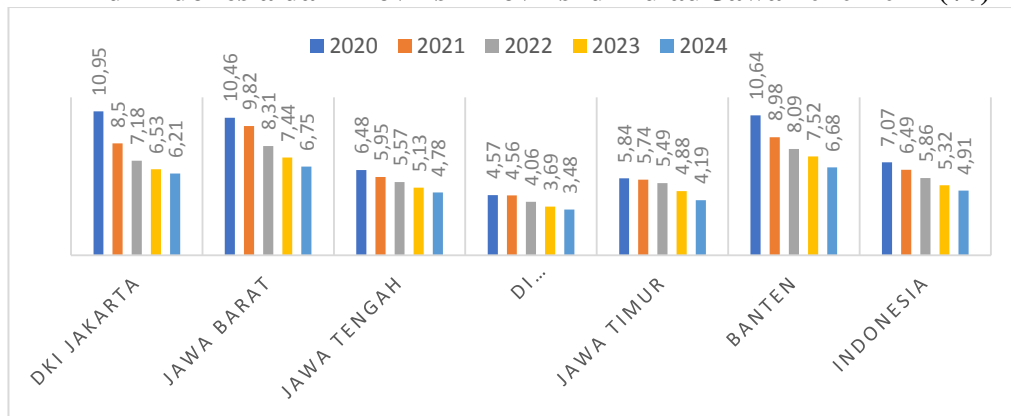
Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan tersebut menegaskan pentingnya pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. (Afrizal & Hasmarini, 2024). Fokus pembangunan yang mengarah pada penguatan struktur ekonomi memiliki kaitan erat dengan upaya pengurangan tingkat pengangguran, yang menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan (Ghazaly & Gunadi, 2021).

Pengangguran adalah fenomena sosial dan ekonomi yang terjadi ketika individu yang mampu dan bersedia bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan keinginan mereka. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengindikasikan adanya masalah struktural dalam perekonomian suatu negara (Sari & Rizkiyan, 2024). Secara sosial, hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan, merusak harmoni masyarakat, dan memicu konflik. Sedangkan dari sisi ekonomi, pengangguran dapat menghambat pertumbuhan, menurunkan daya konsumsi masyarakat, serta mengurangi pendapatan negara (Wulandari et al., 2024).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator pengangguran yang dapat mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja dan pemerataan kesempatan kerja. Indikator ini menggambarkan persentase jumlah pengangguran dibandingkan dengan total angkatan kerja, yang mencakup penduduk usia kerja berusia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja, memiliki pekerjaan tetapi untuk sementara tidak bekerja, atau termasuk kategori pengangguran. Dengan menggunakan TPT, jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dapat diperkirakan secara lebih akurat (Tumanggor & Rahmawan, 2024).

Setiap wilayah memiliki karakteristik pasar kerja yang unik, tergantung pada faktor geografis, potensi sektor unggulan, dan kualitas sumber daya manusia. Ketimpangan ini menyebabkan perbedaan tingkat pengangguran antarprovinsi yang cukup signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) selama 5 tahun terakhir (2020-2024), Provinsi Banten merupakan salah satu wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia. Berikut data tingkat penganggurannya:

Grafik 1.1
TPT di Indonesia dan Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa 2020-2024 (%)



Sumber: Website Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia

Berdasarkan data BPS selama lima tahun terakhir (2020–2024), Provinsi Banten mencatatkan TPT yang tergolong tinggi secara nasional, bahkan menjadi salah satu provinsi dengan TPT tertinggi di Indonesia. Rata-rata TPT Banten dalam periode ini mencapai 8,38%, jauh di atas rata-rata nasional yang berada pada 5,93%. Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi nasional, Provinsi Banten tetap menunjukkan angka pengangguran yang relatif tinggi. Seperti DKI Jakarta (7,87%), Jawa Tengah (5,59%), DI Yogyakarta (4,07%), dan Jawa Timur (5,29%).

Meskipun Jawa Barat sedikit lebih tinggi dalam rata-rata lima tahunan (8,56%), Banten secara konsisten bersaing sebagai provinsi dengan TPT tertinggi terutama pada tahun 2023, dengan nilai mencapai 7,52%. Bahkan, angka TPT Banten kerap melebihi DKI Jakarta, padahal DKI Jakarta adalah

pusat aktivitas ekonomi nasional. Seperti pada tahun 2024, meskipun TPT Banten menurun menjadi 6,68%, angkanya masih lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 4,91%, dan bahkan lebih tinggi dari DKI Jakarta (6,21%), padahal Jakarta adalah ibu kota dengan tekanan urbanisasi yang besar.

Provinsi Banten memiliki letak yang sangat strategis, menjadikannya salah satu wilayah unggulan di Indonesia. Sebagai pintu gerbang utama pergerakan manusia, barang, dan jasa antara Pulau Jawa dan Sumatera, Banten juga berperan sebagai simpul perdagangan antardaerah. Selain itu, provinsi ini terletak di jalur penting Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yaitu wilayah ALKI 1, yang merupakan jalur laut internasional yang penting bagi lalu lintas maritim dan perdagangan. Keberadaan Banten di wilayah ALKI 1 memberikan akses mudah terhadap jalur perdagangan internasional, yang menjadikannya bagian dari jaringan perdagangan Asia dan internasional,

Keberadaan Banten juga sangat berpengaruh bagi wilayah sekitarnya, khususnya kawasan Tangerang Raya (meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan), yang berfungsi sebagai daerah penyangga bagi DKI Jakarta, ibu kota Indonesia. Aktivitas perdagangan antarwilayah dan internasional menciptakan permintaan tenaga kerja, baik terampil maupun tidak terampil. Kawasan industri dan pelabuhan seperti Tanjung Priok dan Bandara Soekarno-Hatta juga menjadi pusat penyerapan tenaga kerja. Meski memiliki banyak potensi kerja, Banten justru menjadi salah satu provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia.

Untuk memahami lebih jauh permasalahan pengangguran di Provinsi Banten, penting untuk melihat dinamika TPT di tingkat kabupaten/kota. Berikut disajikan datanya.

Tabel 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2020-2024 (%)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kab Pandeglang	9.15	7.7	9.24	9.05	8.09
Kab Lebak	9.63	7.86	8.55	7.57	6.23
Kab Tangerang	13.06	9.06	7.88	6.94	6.06
Kab Serang	12.22	10.58	10.61	9.94	9.18
Kota Tangerang	8.63	9.07	7.16	6.76	5.92

Kota Cilegon	12.69	10.13	8.1	7.25	6.08
Kota Serang	9.26	9.41	8.17	7.45	7.12
Kota Tangerang Selatan	8.48	8.6	6.59	5.81	5.09

Sumber: Website Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) diatas, perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten/Kota Provinsi Banten selama lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, namun angkanya masih tergolong tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Seperti Kabupaten Tangerang (13,06% pada 2020) dan Kabupaten Serang (12,22% pada 2020). Meskipun angka tersebut menurun pada tahun 2024, disparitas antarkabupaten/kota masih terlihat jelas. Misalnya, Kabupaten Serang masih mencatat TPT sebesar 9,18% (2024), sementara Kota Tangerang Selatan memiliki TPT terendah (5,09%). Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam pembangunan dan penyerapan tenaga kerja di wilayah Banten. Tingginya TPT di beberapa kabupaten/kota di Banten, terutama yang melebihi rata-rata nasional, menjadi pemicu masalah penelitian ini.

Menurut Solihah & Arisetyawan (2025) untuk menghadapi tantangan tersebut, upaya penciptaan lapangan kerja perlu disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas ini tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. IPM tidak hanya menggambarkan kemampuan tenaga kerja, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja. Investasi di bidang pendidikan merupakan faktor kunci dalam menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Alokasi yang lebih besar untuk pembangunan manusia, khususnya di bidang pendidikan, tidak hanya berkontribusi pada pengurangan pengangguran tetapi juga meningkatkan daya saing tenaga kerja dan upah pekerja (Yanti et al., 2020).

Pandangan ini sejalan dengan teori modal manusia (*The Human Capital Theory*) sebagaimana dikemukakan oleh Gary Becker (1962) dalam artikelnya yang berjudul “Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis”, yang menyatakan bahwa manusia adalah aset utama dalam

pembangunan ekonomi, dan investasi pada manusia melalui pendidikan, pelatihan, serta kesehatan memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja. Layaknya modal fisik, semakin tinggi investasi pada manusia, semakin besar keterampilan dan produktivitas yang dihasilkan. Sehingga tenaga kerja mampu bersaing secara efektif, lebih mudah terserap di pasar kerja dan berkontribusi pada pengurangan pengangguran (Adriani, 2019). Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar IPM berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja dan berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran.

Berikut tabel IPM (UHH LF SP2020) di Kabupaten/Kota Provinsi Banten dan Indonesia.

Tabel 1.2
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2024

Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Kab Pandeglang	68.86	69.02	69.7	70.28	70.88
Kab Lebak	66.39	66.5	67.19	67.68	68.33
Kab Tangerang	74.09	74.47	75.15	75.56	76.19
Kab Serang	70.93	71.05	71.99	72.63	73.28
Kota Tangerang	79.83	80.08	80.44	80.98	81.53
Kota Cilegon	76.8	77.11	77.68	78.24	78.83
Kota Serang	75.25	75.53	76.01	76.43	76.9
Kota Tangerang Selatan	82.73	82.98	83.28	83.57	84.16
Provinsi Banten	74.41	74.68	75.25	75.77	76.35

Sumber: Website Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten

Provinsi Banten menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembangunan manusia selama lima tahun terakhir (2020-2024), tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang konsisten. Akan tetapi, di tengah peningkatan IPM yang positif, tingkat pengangguran terbuka (TPT) justru menunjukkan pola yang fluktuatif dan tidak konsisten menurun. Sebagai contoh di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, TPT pada tahun 2021 sebesar 7,7% dan 7,86% meningkat menjadi 9,24% dan 8,55% pada 2022. Begitu pula dengan Kota Serang dimana TPT mengalami peningkatan dari 9,26% (2021) menjadi 9,41% (2022) serta di Kabupaten Serang yang meskipun IPM-nya meningkat, tetap mencatatkan TPT tinggi

sebesar 9,18% pada 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM tidak secara langsung menurunkan angka pengangguran di wilayah tersebut.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai efektivitas pembangunan manusia dalam mengatasi pengangguran di Provinsi Banten. Hal ini menjadi menarik jika dikaji melalui teori modal manusia (*human capital theory*) yang dikemukakan oleh Theodore W. Schultz dan Gary Becker. Teori ini menyatakan bahwa investasi pada pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Namun, kenyataan di Banten justru menunjukkan bahwa meskipun investasi pembangunan manusia meningkat (ditunjukkan dengan naiknya IPM), hal tersebut belum mampu secara signifikan menurunkan angka pengangguran. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki penduduk dengan kebutuhan dunia kerja, rendahnya pertumbuhan sektor padat karya, atau keterbatasan akses lapangan kerja produktif di wilayah tertentu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Intan, 2021) variabel indeks pembangunan manusia (IPM) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Namun, penelitian (Saputri & Yefriza, 2025) menemukan bahwa variabel IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kepulauan Riau. Artinya peningkatan IPM dapat menurunkan tingkat pengangguran.

Indikator selanjutnya yang mempengaruhi pengangguran yaitu pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan erat dengan penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja suatu wilayah, baik secara nasional maupun regional. Ketika perekonomian suatu daerah mengalami pertumbuhan, aktivitas produksi barang dan jasa juga meningkat. Hal ini mendorong dunia usaha untuk memperluas kapasitas produksi, yang pada akhirnya menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran.

Pendekatan teori Keynesian mendukung hubungan tersebut. Menurut Keynes, peningkatan permintaan agregat yang mendorong pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan ekspansi dalam kapasitas produksi. Untuk memenuhi permintaan tersebut, pelaku usaha akan meningkatkan jumlah tenaga kerja, sehingga pengangguran pun menurun (Putri et al., 2024). Teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat akan mendorong peningkatan pendapatan, konsumsi, dan investasi masyarakat, yang kemudian menciptakan siklus ekonomi yang produktif dan mampu mengurangi pengangguran secara berkelanjutan (Putri & Rusdi, 2025).

Sejalan dengan teori diatas, Menurut penelitian Restianjani & Widyawati (2025) naik turunnya pertumbuhan ekonomi pada setiap provinsi di Indonesia akan berdampak terhadap pengangguran pada setiap provinsi di Indonesia sepanjang periode 2015-2022. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, output dihasilkan akan lebih banyak sehingga tenaga kerja dapat terserap dan angka pengangguran pun akan turun. Salah satu indikator penting yang mencerminkan kondisi pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam periode tertentu, sehingga sering digunakan sebagai indikator utama dalam menilai tingkat kemakmuran dan aktivitas ekonomi daerah tersebut.

Secara teoritis, peningkatan PDRB memiliki hubungan positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Semakin besar nilai PDRB, maka semakin besar pula potensi sektor-sektor ekonomi untuk menarik lebih banyak tenaga kerja. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui peningkatan PDRB diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran secara signifikan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Umam, 2022).

Hukum Okun menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan PDRB berpotensi besar dalam menurunkan tingkat pengangguran. Ketika sektor-sektor ekonomi tumbuh dan berkembang, maka kebutuhan akan tenaga kerja pun meningkat, sehingga tercipta lebih banyak lapangan kerja baru. Dengan demikian, peningkatan PDRB dapat menjadi

salah satu strategi efektif dalam mengurangi pengangguran (Ambarini & Karmini, 2022).

Dalam konteks Provinsi Banten, yang secara geografis dan ekonomis memiliki keunggulan kompetitif, pertumbuhan PDRB diharapkan mampu menjadi motor penggerak penciptaan lapangan kerja. Namun, kenyataan bahwa Banten masih mencatat tingkat pengangguran terbuka yang tinggi.

Table 1.3
PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020-2024 (%)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kab Pandeglang	-0.67	3.1	3.47	2.53	2.75
Kab Lebak	-0.91	3.18	3.8	2.8	2.95
Kab Tangerang	-3.76	4.7	5.47	5.18	5
Kab Serang	-2.73	3.74	5.03	4.8	4.78
Kota Tangerang	-7.36	3.9	5.98	5.57	5.04
Kota Cilegon	-1.23	5.24	4.51	4.82	4.84
Kota Serang	-1.29	3.88	4.71	4.74	4.71
Kota Tangerang Selatan	-1.01	4.81	5.81	5.36	5.02

Sumber: Website Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa hampir seluruh wilayah di Provinsi Banten mengalami kontraksi ekonomi pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Namun, memasuki tahun 2021 hingga 2024, tren pertumbuhan PDRB di Banten menunjukkan pemulihan. Namun, Jika dicermati lebih lanjut wilayah dengan laju pertumbuhan PDRB yang tinggi belum tentu memiliki tingkat pengangguran terbuka yang rendah. Misalnya di Kota Tangerang PDRB meningkat dari -7,36 % (2020) menjadi 3,9% (2021) meningkatkan TPT dari 8,63% menjadi 9,07% pada tahun yang sama. Begitu pula di Kabupaten Lebak PDRB meningkat dari 3,18% (2020) menjadi 3,8% (2021) meningkatkan TPT dari 7,86 % menjadi 8,55% pada tahun yang sama. Selain itu, meskipun Kabupaten Serang mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,78% pada tahun 2024, tingkat penganggurannya masih tinggi, yakni 9,18%. Sebaliknya, Kota Tangerang Selatan dengan pertumbuhan ekonomi yang juga cukup tinggi, yaitu 5,02%, berhasil menekan pengangguran hingga 5,09%.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di Provinsi Banten tidak selalu linier. Fenomena ini sejalan dengan hukum okun dan juga konsep *jobless growth* yang dikemukakan oleh Keynes, di mana pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh penciptaan lapangan kerja yang cukup. Konsep ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang memadai. Meskipun indikator PDRB menunjukkan adanya perbaikan ekonomi di sebagian besar wilayah, hal tersebut belum mampu mengatasi persoalan pengangguran secara menyeluruh.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tidak selalu bersifat linier atau seragam di semua wilayah. Sebagai contoh, penelitian Hasim & A'yun (2025) menunjukkan hasil yang berbeda. Berdasarkan hasil uji statistik, pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pengangguran. Bahkan, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi justru diikuti oleh kenaikan angka pengangguran, meskipun dalam tingkat yang sangat kecil dan tidak signifikan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa peningkatan produksi barang dan jasa di wilayah tersebut belum sepenuhnya mampu menciptakan kesempatan kerja yang merata bagi masyarakat.

Tidak semua pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif atau mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam banyak kasus, pertumbuhan justru didorong oleh sektor-sektor yang padat modal seperti pertambangan atau industri berskala besar yang tidak banyak menyerap tenaga kerja secara langsung. Akibatnya, meskipun PDRB mengalami peningkatan, pengangguran tetap berada pada level yang stagnan atau bahkan meningkat. Kondisi ini memperkuat pandangan Keynes yang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengarahkan kebijakan ekonomi. Keynes berpendapat bahwa intervensi pemerintah, melalui stimulus fiskal seperti peningkatan belanja publik atau proyek-proyek pembangunan infrastruktur, diperlukan untuk mendorong permintaan agregat dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Dalam konteks kebijakan ketenagakerjaan, salah satu bentuk nyata dari intervensi pemerintah adalah penetapan Upah Minimum. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin kesejahteraan pekerja, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong pemerataan pendapatan dan menjaga stabilitas sosial ekonomi. Menurut Ningsi (2023), upah minimum memiliki pengaruh terhadap tingkat kesempatan kerja dan pengangguran. Tujuan utama dari penetapan upah minimum adalah untuk menjamin pekerja memperoleh penghasilan yang cukup guna memenuhi standar hidup layak. Kebijakan ini menjadi sangat relevan di negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki jumlah penduduk tinggi dan kondisi sosial ekonomi yang beragam.

Sejalan dengan itu, penelitian lain menyebutkan bahwa upah minimum merupakan instrumen yang dirancang untuk memastikan pekerja menerima kompensasi setidaknya setara dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), agar tidak ada pekerja yang dieksploitasi melalui upah (Saputri & Yefriza, 2025). Namun, dalam dinamika pasar tenaga kerja, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan. Ketika upah minimum bersifat kaku dan tidak fleksibel terhadap dinamika penawaran dan permintaan tenaga kerja, maka tercipta ketidakseimbangan. Dalam pandangan Keynes, penciptaan lapangan kerja baru hanya akan terjadi jika upah mengalami penyesuaian ke bawah dalam kondisi lesunya permintaan tenaga kerja. Sebaliknya, jika upah terlalu rendah, maka partisipasi angkatan kerja bisa menurun karena pekerjaan dianggap tidak menarik lagi (Badria, 2021).

Menurut pandangan klasik, penetapan upah minimum di atas tingkat ekuilibrium pasar dapat menyebabkan kelebihan penawaran tenaga kerja, sehingga meningkatkan pengangguran. Namun, menurut teori upah efisiensi menyatakan bahwa kenaikan upah akan meningkatkan produktivitas pekerja dimana peningkatan upah dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan stabil, sehingga dalam jangka panjang mampu mendorong pertumbuhan usaha dan penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi (Agusalim & Novianti, 2023).

Table 1.4
Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020-2024 (Rp)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kab Pandeglang	2.758.909	2.800.293	2.800.293	2.980.351	3.010.929
Kab Lebak	2.710.654	2.751.314	2.773.590	2.944.665	2.978.764
Kab Tangerang	4.168.268	4.230.793	4.230.793	4.527.689	4.601.988
Kab Serang	4.152.887	4.215.181	4.215.181	4.492.961	4.560.894
Kota Tangerang	4.199.029	4.262.015	4.285.799	4.584.519	4.760.289
Kota Cilegon	4.246.081	4.309.773	4.340.254	4.657.223	4.815.102
Kota Serang	3.773.940	3.830.549	3.850.526	4.090.799	4.148.602
Kota Tangerang Selatan	4.168.268	4.230.793	4.280.214	4.551.452	4.670.791

Sumber: Website Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten

Secara umum, upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Provinsi Banten mengalami kenaikan setiap tahunnya selama periode 2020–2024, meskipun pada beberapa daerah kenaikannya cenderung stagnan pada 2021–2022 seperti di Kabupaten Tangerang dan Pandeglang. Menariknya, meskipun UMK di Kabupaten Pandeglang tetap di angka Rp2.800.293 selama dua tahun tersebut, angka pengangguran justru meningkat dari 7,7% menjadi 9,24%. Sebaliknya, Kabupaten Tangerang yang juga memiliki UMK stagnan sebesar Rp4.230.793 pada periode yang sama justru berhasil menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 9,06% menjadi 7,88%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh UMK terhadap pengangguran bisa bervariasi tergantung pada karakteristik ekonomi dan ketenagakerjaan masing-masing daerah.

Fenomena serupa juga dapat diamati di Kota Cilegon, Sebagai kota industri, Cilegon mencatat kenaikan UMK yang konsisten dari Rp4.246.081 pada tahun 2020 menjadi Rp4.815.102 pada tahun 2024. Angka pengangguran di kota ini terus menurun dari 12,69% menjadi 6,08% dalam lima tahun terakhir. Tren ini menunjukkan bahwa di daerah dengan struktur industri yang kuat, kenaikan UMK cenderung berjalan seiring dengan peningkatan serapan tenaga kerja.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Marliana (2022) yang menyimpulkan bahwa secara parsial, upah minimum berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Artinya, semakin tinggi upah minimum, maka tingkat pengangguran cenderung menurun. Namun, tidak semua wilayah menunjukkan pola yang sama. Penelitian lain dalam dokumen Ambarini & Karmini (2022) yang dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali justru menemukan bahwa variabel upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dalam konteks ini, kenaikan upah minimum justru diikuti oleh peningkatan pengangguran.

Sementara itu, penelitian lain yang dilakukan di Kota Semarang Nurfardhan et al., (2025) menunjukkan bahwa hubungan antara UMK dan Tingkat Pengangguran Terbuka tidak signifikan secara statistik. Meskipun arah koefisien regresinya positif, pengaruhnya sangat kecil dan tidak cukup kuat untuk dianggap bermakna secara ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan UMK tidak selalu memiliki dampak langsung terhadap tingkat pengangguran, atau bisa jadi pengaruhnya tertutupi oleh variabel lain seperti iklim investasi, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat produktivitas tenaga kerja, serta peran sektor informal dalam menyerap tenaga kerja.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa permasalahan pengangguran di Provinsi Banten tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu variabel tunggal, melainkan melibatkan dinamika kompleks dari pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan upah. Oleh karena itu, untuk memahami lebih dalam fenomena yang terjadi, penelitian ini akan mengkaji *“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada Tahun 2020–2024”*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas masalah tingkat pengangguran dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten tergolong tinggi secara nasional, meskipun provinsi ini memiliki posisi geografis yang strategis dan merupakan wilayah penyangga ibukota negara yakni DKI Jakarta yang merupakan jantung pemerintahan dan perekonomian nasional. Rata-rata TPT Banten selama periode 2020–2024 mencapai 8,38%, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 5,93% dan bahkan selama tahun 2021-2024 selalu berada di atas TPT DKI Jakarta.
2. Adanya ketimpangan penyerapan tenaga kerja atau disparitas antar kabupaten/kota dimana terdapat perbedaan mencolok dalam angka pengangguran di antara wilayah-wilayah di Banten. Misalnya, Kabupaten Serang mencatatkan TPT sebesar 9,18%, sementara Kota Tangerang Selatan hanya 5,09%. Ini menunjukkan bahwa pembangunan dan kesempatan kerja belum merata di seluruh wilayah provinsi Banten.
3. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Banten tidak selalu diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran secara signifikan. Meskipun IPM Banten mengalami peningkatan TPT di beberapa wilayah tetap tinggi atau bahkan fluktuatif. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pembangunan manusia dalam menurunkan pengangguran.
4. Keterampilan Tenaga Kerja Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Kebutuhan Pasar Kerja. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan dunia kerja. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan *mismatch* atau ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja dengan kebutuhan sektor industri dan jasa yang berkembang di wilayah tersebut.
5. Pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan melalui PDRB belum selalu berbanding lurus dengan penurunan pengangguran. Beberapa kabupaten/kota yang mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi tetap menunjukkan TPT yang tinggi, yang menandakan adanya fenomena *jobless growth* di wilayah tersebut.

6. Kenaikan upah minimum menunjukkan hubungan yang tidak seragam terhadap pengangguran. Beberapa wilayah mengalami penurunan TPT seiring kenaikan upah minimum, namun ada juga wilayah yang mengalami kenaikan TPT meskipun upah minimumnya meningkat, menandakan hubungan yang kompleks dan tidak linier.
7. Kebijakan Pemerintah Belum Sepenuhnya Efektif dalam Mendorong Penyerapan Tenaga Kerja. Meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan seperti penetapan upah minimum dan berbagai stimulus ekonomi, kenyataannya lapangan kerja yang tercipta belum merata, terutama di sektor padat karya. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penyesuaian kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar penelitian lebih terfokus maka penelitian ini menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2020-2024.
2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2020-2024.
3. Pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2020-2024.
4. Pengaruh indeks pembangunan manusia , pertumbuhan ekonomi dan upah minimum secara bersama-sama (simultan) terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2020-2024.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2020-2024?

2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2020-2024?
3. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2020-2024?
4. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum secara bersama-sama (simultan) terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2020-2024?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk masing-masing rumusan masalah diatas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2020-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2020-2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum secara bersama-sama (simultan) terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2020-2024.

F. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang ekonomi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan upah terhadap tingkat pengangguran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademis mengenai relevansi teori Human Capital, teori Keynesian, serta hukum Okun dalam konteks daerah berkembang seperti Provinsi Banten.

b. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berbasis data untuk merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam menurunkan tingkat pengangguran. Dan bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau acuan bagi penelitian lanjutan yang ingin mengkaji variabel-variabel lain yang turut memengaruhi pengangguran secara lebih komprehensif.

2. Luaran Penelitian

Luaran dari penelitian ini adalah agar hasil penelitian ini dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah serta menjadi pedoman dan referensi dalam pengembangan pengetahuan mengenai indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran terbuka di tingkat daerah, khususnya di Kabupate/Kota Provinsi Banten.

G. Definisi Operasional

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara operasional didefinisikan sebagai persentase jumlah penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan terhadap total jumlah angkatan kerja di suatu wilayah tertentu.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan

kualitas hidup masyarakat. IPM menggambarkan sejauh mana penduduk di suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan melalui tiga dimensi dasar, yaitu: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Pertumbuhan Ekonomi adalah peningkatan secara berkelanjutan dalam nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi diukur melalui laju pertumbuhan ekonomi, yaitu persentase perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari satu tahun ke tahun sebelumnya.

Upah Minimum adalah standar upah terendah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja yang dinyatakan dalam satuan rupiah per bulan dan digunakan sebagai indikator perlindungan kesejahteraan tenaga kerja di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, TPT merupakan sebagai variabel terikat yang dipengaruhi oleh IPM, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum, dengan asumsi bahwa peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta kebijakan upah yang seimbang dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada periode 2020–2024.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan teori

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Menurut Elmizan & Asy'ari (2021) pengangguran merujuk pada kondisi di mana seseorang yang berada dalam usia kerja, umumnya antara 18 hingga 55 tahun sedang aktif mencari pekerjaan namun belum memperoleh pekerjaan. Artinya, individu tersebut secara fisik mampu dan bersedia bekerja, tetapi belum mendapatkan kesempatan kerja pada saat dilakukan survei ketenagakerjaan. Dalam pengukuran statistik ketenagakerjaan, kondisi ini dinyatakan dalam bentuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu indikator penting yang menggambarkan proporsi angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan, namun secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja.

Dalam konteks Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), pengangguran terbuka didefinisikan secara lebih spesifik. Mereka mencakup: Penduduk yang tidak sedang bekerja dan secara aktif mencari pekerjaan, penduduk yang tidak bekerja namun sedang mempersiapkan usaha; penduduk yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan serta mereka yang tidak bekerja dan belum mulai bekerja karena masih menunggu waktu mulai pekerjaan yang sudah diperoleh. Dengan demikian, TPT tidak hanya mencerminkan jumlah pencari kerja, tetapi juga mencakup berbagai dinamika ketenagakerjaan yang mencerminkan harapan, hambatan, dan kesiapan individu untuk memasuki pasar kerja. (Badan Pusat Statistik, 2021).

Pengangguran terbuka (*open unemployment*) adalah kondisi ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan. Jenis pengangguran terbuka terbagi menjadi dua:

- a. Pengangguran sukarela, yaitu mereka yang memilih untuk tidak bekerja karena merasa gaji yang ditawarkan tidak sesuai atau sedang menunggu pekerjaan yang lebih baik.
- b. Pengangguran terpaksa, yaitu mereka yang ingin bekerja namun belum mendapatkan pekerjaan yang tersedia.

Tingkat pengangguran terbuka dihitung dengan rumusan berikut:

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Pendekatan ini membantu menggambarkan seberapa besar proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dalam suatu waktu (Suparmono, 2018).

Menurut Neno et al., (2024) pengangguran pada dasarnya berakar dari dinamika di pasar tenaga kerja, yaitu ruang interaksi antara pencari kerja dan pihak yang menawarkan pekerjaan. Pasar tenaga kerja melibatkan pelaku-pelaku seperti pengusaha, pencari kerja, dan pihak ketiga sebagai perantara. Ketidakefektifan dalam pasar tenaga kerja dapat menjadi penyebab utama pengangguran. Hal ini sering dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang dianggap membebani, seperti regulasi upah minimum, aturan pesangon, serta perlindungan tenaga kerja, yang tidak selalu dapat dijalankan oleh semua perusahaan.

Berdasarkan penyebabnya, pengangguran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pengangguran Friksional

Terjadi ketika tenaga kerja berpindah pekerjaan untuk mencari posisi yang lebih baik. Dalam ekonomi yang tumbuh pesat, ketersediaan lapangan kerja meningkat, bahkan menyebabkan pengusaha kesulitan mencari tenaga kerja. Kondisi ini mendorong pekerja meninggalkan pekerjaan lama demi upah yang lebih tinggi. Masa transisi ini digolongkan sebagai pengangguran friksional.

b. Pengangguran Siklikal

Berkaitan dengan fluktuasi siklus ekonomi. Ketika permintaan agregat meningkat, perusahaan cenderung menambah tenaga kerja. Sebaliknya, saat permintaan menurun, produksi dikurangi, dan terjadi pengurangan tenaga kerja yang menyebabkan pengangguran meningkat.

c. Pengangguran Struktural

Muncul akibat perubahan struktur ekonomi, di mana sebagian perusahaan mengalami penurunan daya saing atau efisiensi, misalnya karena biaya operasional yang tinggi. Akibatnya, produksi menurun dan sejumlah tenaga kerja kehilangan pekerjaan.

d. Pengangguran Teknologi

Terjadi karena kemajuan teknologi yang menggantikan peran tenaga manusia dalam proses produksi yang secara otomatis mengurangi kebutuhan tenaga kerja, sehingga menciptakan pengangguran di sektor tertentu.

Menurut Suharnanik (2023) tingkat pengangguran yang tinggi mencerminkan ketidakstabilan ekonomi dan kesulitan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar. Berbagai faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran antara lain:

- a. Pertumbuhan Ekonomi: Tingkat pengangguran sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, penciptaan lapangan kerja baru cenderung meningkat, sehingga pengangguran menurun.
- b. Keterampilan dan Pendidikan: Pengangguran lebih tinggi terjadi di kalangan individu yang memiliki keterampilan dan tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia penting untuk menekan pengangguran.
- c. Perubahan Teknologi: Kemajuan teknologi dapat menyebabkan pergeseran dalam struktur lapangan kerja, terutama di sektor-sektor

tradisional. Namun, di sisi lain, teknologi juga menciptakan peluang kerja baru di sektor yang berkembang.

- d. Kebijakan Pemerintah: Kebijakan fiskal, pajak, subsidi, dan regulasi lainnya berpengaruh terhadap penciptaan atau pengurangan lapangan kerja. Misalnya, subsidi di sektor tertentu dapat meningkatkan kesempatan kerja, sedangkan kebijakan fiskal ketat bisa menekan penciptaan lapangan kerja.
- e. Kondisi Pasar Tenaga Kerja: Faktor-faktor seperti tingkat upah, kebijakan ketenagakerjaan, dan ketersediaan tenaga kerja memengaruhi dinamika pengangguran. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat meningkatkan angka pengangguran.
- f. Faktor Demografi: Kelompok usia muda atau kelompok minoritas seringkali mengalami tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia dewasa atau mayoritas, karena perbedaan akses terhadap pendidikan dan peluang kerja.
- g. Kondisi Ekonomi Global: Krisis ekonomi global atau perubahan dalam perdagangan internasional juga dapat mempengaruhi stabilitas pasar kerja dalam negeri, sehingga berdampak pada tingkat pengangguran nasional.

Adapun teori-teori tentang pengangguran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Teori Keynes

Menurut John Maynard Keynes (1936) dalam buku *“The General Theory of Employment, Interest, and Money*, pengangguran tidak selalu disebabkan oleh keengganan tenaga kerja untuk bekerja pada tingkat upah tertentu, melainkan karena kurangnya permintaan agregat dalam perekonomian. Keynes menekankan bahwa dalam kondisi tertentu, pasar tidak dapat secara otomatis mencapai keseimbangan penuh (*full employment*) seperti yang diasumsikan

dalam teori klasik. Ketika permintaan agregat (total pengeluaran konsumsi dan investasi) menurun, maka produksi dan lapangan kerja juga akan menurun, sehingga timbul pengangguran involunter. Lebih lanjut, Keynes mengkritik teori klasik yang menyatakan bahwa penurunan upah nominal akan mengurangi pengangguran. Menurutnya, penurunan upah dapat justru mengurangi daya beli masyarakat, menurunkan permintaan barang dan jasa, serta memperburuk kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Keynes juga memperkenalkan konsep permintaan efektif (*effective demand*), yaitu tingkat permintaan agregat yang menentukan tingkat produksi dan lapangan kerja. Dalam kerangka Keynesian, pengangguran dapat diatasi melalui: Peningkatan belanja pemerintah (*fiscal policy*), penurunan suku bunga untuk mendorong investasi (*monetary policy*), dan intervensi negara untuk mendorong permintaan agregat.

Dalam pandangan Keynes, perekonomian tidak selalu berada dalam kondisi *full employment*, dan bisa saja mengalami keseimbangan dengan pengangguran tinggi apabila permintaan agregat tidak mencukupi. Keynes menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui peningkatan output nasional umumnya mencerminkan peningkatan permintaan agregat. Ketika pertumbuhan ekonomi terjadi, konsumsi rumah tangga, investasi sektor swasta, dan pengeluaran pemerintah akan meningkat. Peningkatan ini akan mendorong perusahaan untuk: Meningkatkan produksi, menambah kapasitas usaha, merekrut tenaga kerja tambahan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi secara langsung berdampak terhadap penurunan tingkat pengangguran. Hubungan ini sangat penting terutama dalam kondisi krisis atau resesi, di mana peran kebijakan fiskal sangat krusial untuk memacu pertumbuhan (Priyono & Ismail, 2012).

Kaum Keynesian berpendapat bahwa sistem ekonomi pasar secara alami mengalami siklus ekonomi fase ekspansi (*booming*) dan

kontraksi (*bust*). Pada fase kontraksi, pengangguran meningkat karena aktivitas ekonomi melambat. Sebaliknya, ketika perekonomian memasuki fase ekspansi, permintaan meningkat dan pengangguran pun menurun. Teori ini menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk mendorong permintaan agregat, terutama pada masa resesi. Melalui kebijakan fiskal seperti peningkatan belanja publik atau stimulus ekonomi, pemerintah dapat mengurangi pengangguran, mendorong konsumsi, dan menghidupkan kembali aktivitas produksi (Wairooy & Haryono, 2023).

b. Teori Hukum Okun (*Okun's Law*)

Hukum Okun pertama kali dikemukakan oleh Arthur M. Okun (1962) dalam tulisannya berjudul "*Potential GNP: Its Measurement and Significance*". Hukum ini menggambarkan hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan tingkat output nasional (Produk Nasional Bruto/PDB riil). Menurut Okun, setiap kenaikan satu poin persentase dalam tingkat pengangguran akan menyebabkan penurunan sekitar tiga persen dalam output riil dibandingkan dengan output potensial ekonomi. Artinya, pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen dapat menurunkan pengangguran sebesar 0,3%, dengan asumsi bahwa perekonomian sedang bergerak mendekati atau menuju tingkat kesempatan kerja penuh.

Ketika ekonomi tumbuh (output naik), maka: Permintaan barang dan jasa meningkat, perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk memenuhi permintaan tersebut. Maka, perusahaan mulai merekrut pekerja baru, termasuk mereka yang sebelumnya menganggur. Selain itu, pada saat ekonomi tumbuh: Jam kerja per orang cenderung meningkat, produktivitas tenaga kerja membaik, dan anggota potensial dari angkatan kerja (misalnya ibu rumah tangga, pensiunan, dll.) terdorong untuk kembali bekerja.

Teori ini menyatakan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Secara khusus, teori

ini menjelaskan bahwa ketika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami penurunan, maka akan diikuti oleh peningkatan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Penurunan PDRB menunjukkan melemahnya aktivitas ekonomi suatu wilayah, yang berdampak pada berkurangnya kebutuhan tenaga kerja. Akibatnya, banyak pekerja kehilangan pekerjaan, pendapatan masyarakat menurun, dan konsumsi rumah tangga ikut berkurang. Hal ini selanjutnya mengakibatkan penurunan produksi dan kerugian bagi perusahaan, sehingga memperburuk kondisi pengangguran (Qausar & Aminda, 2022).

Secara empiris, Okun menegaskan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya, khususnya tenaga kerja. Dalam kondisi ini, terbatasnya lapangan kerja menyebabkan tenaga kerja yang tersedia tidak terserap sepenuhnya, sehingga berdampak pada menurunnya total output dalam perekonomian. Oleh karena itu, Hukum Okun menjadi dasar teoritis penting dalam menjelaskan bagaimana pengangguran dapat menghambat pertumbuhan ekonomi melalui kurangnya utilisasi sumber daya produktif (Nugroho, 2022).

c. Teori Pengangguran Klasik

Menurut Priyono & Ismail (2012) dalam pandangan teori ekonomi klasik, pasar tenaga kerja bekerja secara efisien melalui mekanisme penyesuaian harga dan upah. Pengangguran dianggap hanya bersifat sementara dan dapat dihilangkan apabila tidak ada campur tangan eksternal yang mengganggu keseimbangan pasar, seperti intervensi pemerintah atau pengaruh serikat buruh. Setiap ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja akan secara otomatis disesuaikan melalui fleksibilitas upah dan harga.

Menurut teori klasik, pertumbuhan ekonomi akan mendorong peningkatan output dan permintaan terhadap barang dan jasa. Hal ini secara otomatis akan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja, sehingga pengangguran dapat ditekan. Dalam sistem pasar bebas yang

kompetitif, pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai mekanisme alamiah untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Teori klasik menilai bahwa penetapan upah minimum oleh pemerintah dapat mengganggu mekanisme pasar tenaga kerja. Jika upah minimum ditetapkan di atas tingkat ekuilibrium pasar, maka perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang diserap karena meningkatnya biaya produksi. Akibatnya, terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja (surplus tenaga kerja), yang menyebabkan pengangguran.

Dalam teori klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dapat mengurangi tingkat pengangguran di suatu wilayah. Artinya, terdapat hubungan yang searah antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran, dimana ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pengangguran cenderung menurun (Palindangan & Bakar 2021)

Teori pengangguran menurut pandangan klasik menyatakan bahwa pasar tenaga kerja berfungsi seperti pasar barang, di mana mekanisme harga dalam hal ini upah akan menyesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Dalam perspektif ini, pengangguran dianggap sebagai fenomena sukarela, karena terjadi ketika individu memilih untuk tidak bekerja akibat menolak upah yang dianggap terlalu rendah. Teori klasik juga mengasumsikan bahwa apabila upah bersifat fleksibel, maka kelebihan tenaga kerja (pengangguran) dapat diserap kembali ke dalam pasar kerja. Oleh karena itu, pengangguran dalam pandangan ini dapat diatasi melalui penyesuaian upah ke tingkat yang memungkinkan keseimbangan pasar tercapai (Sari & Rizkiyan, 2024).

d. Teori Modal Manusia (*Human Capital*)

Gary S. Becker (1962) dalam artikelnya *Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis* menjelaskan bahwa modal manusia (*human capital*) merupakan bentuk investasi yang ditanamkan dalam

diri individu untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan di masa depan. Investasi ini tidak hanya terbatas pada pendidikan formal, tetapi juga mencakup pelatihan kerja, kesehatan, dan informasi ekonomi.

Becker mengemukakan bahwa investasi dalam manusia bekerja layaknya investasi fisik. Seseorang yang mengenyam pendidikan atau pelatihan akan mengorbankan pendapatan saat ini (misalnya, tidak bekerja demi sekolah), namun akan memperoleh pendapatan lebih tinggi di masa mendatang. Dalam kerangka ini, pendidikan, pelatihan kerja, dan kesehatan dianggap sebagai bentuk akumulasi modal yang meningkatkan kapasitas kerja dan daya saing individu di pasar tenaga kerja.

Beberapa poin utama dari teori Becker antara lain: Tingkat pendapatan cenderung meningkat dengan bertambahnya usia dan pengalaman kerja, terutama bagi individu yang memiliki tingkat keterampilan tinggi. Pengangguran cenderung lebih rendah di kalangan individu dengan tingkat pendidikan dan pelatihan yang lebih tinggi. Dan investasi pada modal manusia memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan sosial.

Teori ini berpandangan bahwa pertumbuhan suatu masyarakat ditentukan oleh produktivitas individu, dan apabila setiap orang memperoleh penghasilan yang lebih tinggi akibat pendidikan yang lebih baik, maka secara agregat, pertumbuhan ekonomi masyarakat akan terdorong. Dengan demikian, pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam mengurangi pengangguran, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (Arifin & Firmansyah, 2017).

e. Teori Efisiensi Upah (*Efficiency Wage Theory*)

Menurut Mankiw (2009), teori upah efisiensi menyatakan bahwa perusahaan secara sukarela membayar upah di atas tingkat pasar karena upah yang lebih tinggi dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Meskipun upah tinggi berpotensi menyebabkan kelebihan

penawaran tenaga kerja (pengangguran), perusahaan tetap melakukannya karena manfaat produktivitas yang diperoleh lebih besar dari biayanya. Perusahaan mungkin memilih untuk membayar pekerja mereka lebih dari tingkat pasar karena mereka percaya bahwa upah yang lebih tinggi meningkatkan efisiensi pekerja. Upah yang lebih tinggi dapat menghasilkan pekerja yang lebih sehat, mengurangi pergantian tenaga kerja, menarik pelamar yang lebih baik, meningkatkan motivasi kerja, dan mengurangi kebutuhan pengawasan.

Teori efisiensi upah menyatakan bahwa pemberian upah yang lebih tinggi kepada karyawan dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja. Teori ini didasarkan pada pandangan bahwa kesejahteraan tenaga kerja berpengaruh langsung terhadap kinerja mereka di tempat kerja. Dalam praktiknya, penerapan teori ini dapat berbeda tergantung pada kondisi sosial ekonomi suatu negara. Di negara-negara berkembang atau miskin, teori ini menjelaskan bahwa upah memiliki keterkaitan erat dengan asupan nutrisi.

Pekerja yang memperoleh penghasilan lebih tinggi cenderung mampu memenuhi kebutuhan gizinya, sehingga menjadi lebih sehat dan pada akhirnya lebih produktif. Karena itu, perusahaan di negara berkembang mungkin akan menetapkan upah di atas tingkat keseimbangan demi menjaga kesehatan dan produktivitas tenaga kerja. Sementara itu, di negara maju, upah yang tinggi diyakini dapat menurunkan tingkat perputaran tenaga kerja. Ketika pekerja merasa dihargai secara finansial, mereka cenderung bertahan lebih lama di perusahaan. Hal ini secara tidak langsung akan mengurangi biaya pelatihan dan rekrutmen tenaga kerja baru.

Selain itu, teori efisiensi upah juga menekankan bahwa kualitas kinerja perusahaan sangat bergantung pada upah yang diberikan kepada karyawan. Upah yang rendah dapat mendorong karyawan, terutama yang profesional dan berpendidikan tinggi, untuk mencari pekerjaan lain dengan bayaran lebih baik. Jika hal ini terus terjadi,

maka perusahaan berisiko kehilangan sumber daya manusia terbaiknya. Oleh karena itu, pemberian upah yang layak tidak hanya menjaga stabilitas organisasi, tetapi juga meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Lebih lanjut, teori ini juga menyatakan bahwa upah yang tinggi dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja karyawan. Meskipun pada akhirnya tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas kerja tetap berada pada individu masing-masing, insentif finansial yang memadai dapat mendorong karyawan untuk berusaha lebih keras. Namun, efektivitas penerapan teori efisiensi upah sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam memberikan upah tinggi, kualitas dan keahlian tenaga kerja, serta keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Jika upah diterapkan secara tepat, sesuai dengan kondisi ekonomi dan produktivitas, maka bisa mengurangi pengangguran (Evienia et al., 2014)

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. IPM dirancang sebagai alat ukur yang sederhana namun representatif dalam menilai kualitas hidup masyarakat dan capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu. Hingga kini, IPM masih digunakan dan dipublikasikan secara rutin dalam *Human Development Index* sebagai indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah, khususnya dalam pembangunan manusia (Badan Pusat Statistik, 2017).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran komposit yang digunakan untuk menilai pencapaian pembangunan manusia secara menyeluruh. IPM menyatukan tiga dimensi utama kesejahteraan, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, guna memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah.

a. Kesehatan (Harapan Hidup saat Lahir)

Dimensi ini diukur melalui harapan hidup saat lahir, yaitu rata-rata usia yang diharapkan akan dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir jika pola kematian tetap konstan. Indikator ini mencerminkan kualitas layanan kesehatan serta kondisi hidup masyarakat. Semakin tinggi angka harapan hidup, semakin baik pula sistem kesehatan yang tersedia.

b. Pendidikan

Pendidikan diukur melalui dua indikator:

- 1) Harapan Lama Sekolah, yaitu rata-rata tahun pendidikan yang diharapkan akan ditempuh oleh anak usia sekolah sepanjang hidupnya, yang mencerminkan akses terhadap pendidikan di masa depan.
- 2) Rata-rata Lama Sekolah, yakni rata-rata tahun pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Indikator ini menunjukkan capaian pendidikan aktual di masyarakat dan kualitas sistem pendidikan yang tersedia.

c. Standar Hidup (Pendapatan)

Dimensi ini diukur menggunakan Pendapatan Nasional Bruto (*Gross National Income/GNI*) per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*). Indikator ini menggambarkan tingkat kemakmuran ekonomi masyarakat dan kapasitas individu dalam mengakses barang dan jasa. (Efendi et al., 2024).

Seiring dengan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi global, UNDP melakukan pembaruan metode perhitungan IPM pada tahun 2010, yang kemudian disempurnakan lebih lanjut pada tahun 2011 dan 2014. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi dan relevansi IPM dalam menggambarkan kondisi pembangunan manusia di berbagai wilayah. Beberapa penyempurnaan penting dalam IPM Metode Baru antara lain:

- a. Penggantian indikator pendidikan: Angka melek huruf yang sebelumnya digunakan dianggap sudah tidak lagi memadai untuk mencerminkan kualitas pendidikan. Di banyak daerah, angka melek huruf telah tinggi dan tidak mampu lagi menunjukkan variasi antarwilayah. Oleh karena itu, indikator pendidikan digantikan dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang dinilai lebih representatif.
- b. Perubahan indikator ekonomi: Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita dinilai kurang mampu mencerminkan pendapatan aktual masyarakat. Maka, indikator ekonomi diganti dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang dianggap lebih mencerminkan daya beli dan kemakmuran masyarakat secara langsung.
- c. Perubahan metode penghitungan: IPM versi lama menggunakan rata-rata aritmetika, yang memungkinkan capaian rendah pada satu dimensi tertutupi oleh capaian tinggi di dimensi lain. Dalam metode baru, digunakan rata-rata geometrik, yang memastikan bahwa rendahnya nilai pada satu dimensi akan tetap mempengaruhi nilai akhir IPM secara signifikan. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa pembangunan manusia harus seimbang di semua dimensi kesehatan, pendidikan, dan pendapatan karena semuanya sama penting (Badan Pusat Statistik, 2018).

Umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator penting untuk melihat tingkat kesehatan masyarakat. Indikator ini tetap digunakan karena selain relevan, data pendukungnya juga tersedia secara memadai hingga tingkat kabupaten/kota. Selain itu, sumber data untuk menghitung indikator ini kini telah diperbarui dengan menggunakan hasil *Long Form Sensus Penduduk 2020* (LF SP2020).

Sejak tahun 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mulai menghitung umur harapan hidup (UHH) berdasarkan data LF SP2020. Oleh karena itu, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihasilkan disebut sebagai IPM dengan UHH dari LF SP2020, mencakup periode tahun 2020

hingga 2024. Sementara itu, IPM yang menggunakan UHH hasil proyeksi dari Sensus Penduduk 2010 (IPM dengan UHH SP2010) masih tetap dihitung untuk melanjutkan deret waktu (series) yang telah ada sejak tahun 2010 hingga 2024.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki peran penting dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Dalam perencanaan, IPM membantu menentukan prioritas, seperti meningkatkan mutu dan akses pendidikan atau memperbaiki sektor kesehatan sesuai kebutuhan. IPM juga berguna untuk mengidentifikasi ketimpangan pembangunan antarwilayah, memungkinkan strategi pembangunan yang lebih merata dan inklusif.

Sebagai alat evaluasi, IPM memungkinkan pemerintah menilai efektivitas kebijakan dengan memantau perkembangannya dari waktu ke waktu, memastikan kebijakan tetap relevan. Secara global, IPM digunakan sebagai alat pembandingan antarnegara, mendorong kerja sama internasional dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Dengan demikian, IPM menjadi instrumen penting dalam mendukung kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia (Nugroho et al., 2024).

Paradigma pembangunan manusia berfokus pada memperluas pilihan hidup manusia melalui dua dimensi utama: membangun kemampuan dasar (kesehatan, pengetahuan, keterampilan) dan memanfaatkannya untuk kehidupan yang bermakna. Pendekatan ini mencakup empat elemen kunci:

- a. **Produktivitas:** Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi melalui pekerjaan yang layak, yang secara langsung berkontribusi pada pengurangan pengangguran.
- b. **Ekuitas (Keadilan):** Memberikan akses yang adil terhadap peluang ekonomi dan politik tanpa hambatan struktural.

- c. Kestinambungan (*Sustainability*): Menjamin keberlanjutan sumber daya dan peluang bagi generasi saat ini dan mendatang melalui pengelolaan yang bertanggung jawab.
- d. Pemberdayaan: Mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, menjadikan mereka pelaku utama pembangunan dan agen perubahan (Sa'diah & Larasati, 2025).

Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*) menjelaskan bahwa pendidikan, keterampilan, dan kesehatan merupakan investasi penting dalam diri individu yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan di masa depan (Adriani, 2019). Teori ini menekankan bahwa modal manusia memiliki nilai ekonomi karena dapat memberikan *return*, seperti peningkatan pendapatan, kesehatan, dan kualitas hidup. Berbeda dengan modal fisik, modal manusia melekat pada individu dan tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya (Umamah & Syafitri, 2025).

Dengan berpegang pada teori modal manusia, IPM yang tinggi mencerminkan masyarakat yang lebih sehat, lebih terdidik, dan lebih produktif. Hal ini memberikan dampak langsung pada penurunan tingkat pengangguran. Sebagai contoh:

- a. Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan: Tingkat pendidikan yang lebih tinggi mempersiapkan individu untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang semakin kompleks, sehingga peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan meningkat.
- b. Kesehatan yang Prima: Kondisi kesehatan yang lebih baik memastikan tenaga kerja lebih produktif dan mampu bekerja lebih lama tanpa terhambat oleh masalah fisik.
- c. Peningkatan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi: Komponen kesejahteraan dalam IPM menciptakan daya beli yang lebih kuat di masyarakat, mendorong aktivitas ekonomi, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Peningkatan ini biasanya tercermin dari naiknya nilai pendapatan nasional. Secara umum, pertumbuhan ekonomi ditandai dengan bertambahnya jumlah produksi, peningkatan output per kapita, serta adanya perubahan dalam struktur ekonomi suatu negara. Ada tiga faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi:

- a. Akumulasi modal, yaitu investasi baru dalam berbagai bentuk seperti tanah, peralatan fisik, dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Pertumbuhan penduduk, yang secara langsung akan menambah jumlah angkatan kerja di masa depan;
- c. Kemajuan teknologi, yang mampu mendorong efisiensi dan inovasi dalam proses produksi.

Ketiga faktor ini sangat relevan dengan dinamika global saat ini, terutama di era globalisasi dan digitalisasi, di mana inovasi teknologi dan pengembangan kualitas manusia menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Fadli et al., 2023).

Menurut Madinah & Suparintina (2025) pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk mengukur peningkatan aktivitas ekonomi suatu wilayah dari waktu ke waktu. Salah satu cara untuk menilai pertumbuhan ekonomi secara objektif adalah melalui perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. PDRB merupakan nilai tambah bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Nilai ini mencerminkan hasil dari seluruh aktivitas ekonomi, tanpa memperhatikan kepemilikan faktor produksi, baik oleh penduduk (residen) maupun non-residen. Dalam praktiknya, PDRB dihitung melalui tiga pendekatan utama:

- a. Pendekatan produksi, yang mengukur nilai tambah dari setiap sektor ekonomi;
- b. Pendekatan pengeluaran, yang mencatat seluruh pengeluaran untuk barang dan jasa akhir;

- c. Pendekatan pendapatan, yang menghitung pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi.

Untuk melihat dinamika perekonomian secara lebih akurat, digunakan PDRB atas dasar harga konstan, yaitu penilaian output ekonomi berdasarkan harga tetap pada tahun dasar tertentu. Hal ini bertujuan agar pengaruh inflasi dapat dihilangkan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang diukur benar-benar mencerminkan peningkatan volume produksi, bukan hanya kenaikan harga.

Laju pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan nilai PDRB harga konstan antara dua periode, biasanya dari tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Hasil perhitungan ini menunjukkan sejauh mana pendapatan agregat atau output ekonomi meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwa wilayah tersebut mengalami ekspansi ekonomi, peningkatan produktivitas, serta potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Ketika ekonomi tumbuh, kebutuhan akan jenis keterampilan dan pekerjaan tertentu dapat berubah, misalnya, meningkatnya permintaan untuk profesi berbasis teknologi, sementara pekerjaan yang kurang relevan dengan kebutuhan baru menurun. Jika tenaga kerja tidak memiliki keterampilan yang sesuai atau adaptasi terjadi terlalu lambat, maka pengangguran struktural dapat muncul. Dengan kata lain, pengangguran dapat terjadi akibat ketidakseimbangan antara perubahan kebutuhan ekonomi dengan kemampuan tenaga kerja untuk beradaptasi, bukan karena pertumbuhan ekonomi itu sendiri (Ridwan & Nawir, 2021).

Penerapan Hukum Okun di Indonesia memberikan pemahaman tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Secara umum, hukum ini menunjukkan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka tingkat pengangguran cenderung menurun. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dapat menjadi alat prediksi sekaligus kebijakan untuk mengurangi pengangguran.

Dalam konteks Indonesia, hukum ini relevan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi, khususnya dalam upaya menciptakan lapangan kerja. Mengingat tingginya angka pengangguran masih menjadi salah satu tantangan utama, penerapan Hukum Okun dapat membantu pemerintah dalam merancang strategi jangka panjang untuk menurunkan tingkat pengangguran dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Astari et al., 2019).

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya mencerminkan peningkatan output, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja. Ketika aktivitas ekonomi meningkat, permintaan terhadap tenaga kerja juga tumbuh. Hal ini membuka lebih banyak kesempatan kerja, yang pada akhirnya membantu menurunkan tingkat pengangguran dan memberikan masyarakat akses terhadap mata pencaharian yang lebih stabil. Kondisi ini berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Namun, jika pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan perluasan kesempatan kerja dan pembangunan sosial yang merata, maka bisa menimbulkan masalah baru. Ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi dapat menyebabkan sebagian masyarakat merasa tertinggal. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memicu frustrasi sosial yang berpotensi meningkatkan tingkat kriminalitas. Oleh karena itu, penting bagi pertumbuhan ekonomi untuk bersifat inklusif, dengan memastikan terciptanya lapangan kerja yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat (Masdiantini et al., 2024).

Menurut teori klasik, pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di suatu wilayah. Hal ini karena terdapat hubungan yang berbanding terbalik antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, ketika pertumbuhan ekonomi menurun, tingkat pengangguran cenderung meningkat, dan sebaliknya.

Pertumbuhan ekonomi yang positif mendorong peningkatan aktivitas produksi. Untuk memenuhi permintaan yang meningkat,

perusahaan akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja, jumlah pengangguran pun akan menurun. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran secara langsung.

Sementara itu, Model Keynesian menekankan pentingnya permintaan agregat dalam menurunkan pengangguran. Menurut pendekatan ini, ketika permintaan terhadap barang dan jasa meningkat akibat pertumbuhan ekonomi, maka dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk memenuhi permintaan tersebut. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh peningkatan konsumsi dan investasi dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran (Putri et al., 2024).

4. Upah Minimum

Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menyatakan bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah tersebut ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan, atau ketentuan perundang-undangan, dan mencakup pula tunjangan bagi pekerja dan keluarganya. Upah minimum merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk menjamin standar kelayakan hidup bagi para pekerja. Secara umum, upah minimum dapat dipahami sebagai batas terendah upah yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerjanya. Penetapan upah minimum di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa penentuan upah minimum harus mengacu pada standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) (Kusumanegara & Karmini, 2022).

Dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia, upah minimum memiliki beberapa bentuk dan tingkatan yang diatur berdasarkan wilayah administratif dan sektor usaha. Secara umum, upah minimum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000, upah minimum didefinisikan sebagai upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa:

- a. Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- b. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan upah minimum yang berlaku secara spesifik di masing-masing kabupaten atau kota.

Peraturan lebih lanjut mengenai penetapan UMK tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Upah Minimum, yang menyatakan bahwa besaran UMK harus lebih tinggi dari UMP. Hal ini diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2), yang menegaskan bahwa jika di suatu daerah telah ditetapkan UMK, maka perusahaan tidak diperkenankan membayar upah lebih rendah dari ketentuan tersebut.

Dengan demikian, apabila suatu kabupaten atau kota telah memiliki ketentuan UMK, maka UMK tersebut menjadi standar minimum yang harus dipatuhi, menggantikan UMP sebagai acuan. Ketentuan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, melalui kebijakan pengupahan yang lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup di masing-masing daerah (Purnami, 2015).

Teori upah efisiensi (*efficiency wage theory*) merupakan salah satu pendekatan ekonomi tenaga kerja yang menjelaskan bahwa peningkatan upah dapat berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa perusahaan tidak hanya memberikan upah berdasarkan keseimbangan pasar tenaga kerja, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kinerja dan efisiensi

pekerja. Menurut teori ini, perusahaan enggan menurunkan upah meskipun terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja, karena upah yang rendah justru berpotensi menurunkan produktivitas, semangat kerja, dan loyalitas pekerja. Dengan kata lain, pemotongan upah sebagai strategi efisiensi biaya dapat menjadi kontraproduktif dan merugikan perusahaan secara keseluruhan.

Upah yang kompetitif dapat mengurangi tingkat pergantian pekerja. Ketika upah yang ditawarkan cukup tinggi, pekerja cenderung bertahan di perusahaan dan tidak mencari pekerjaan lain. Hal ini mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan tenaga kerja baru, serta menjaga stabilitas operasional perusahaan. Jika dikaitkan dengan kebijakan upah minimum, teori upah efisiensi memberikan sudut pandang yang berbeda dari teori ekonomi klasik. Menurut pandangan klasik, penetapan upah minimum di atas tingkat ekuilibrium pasar dapat menyebabkan kelebihan penawaran tenaga kerja, sehingga meningkatkan pengangguran. Namun, dalam kerangka teori upah efisiensi, upah minimum yang lebih tinggi justru dapat menurunkan tingkat pengangguran dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh peningkatan produktivitas, loyalitas tenaga kerja, dan efisiensi operasional perusahaan yang dapat mendorong perluasan usaha dan penciptaan lapangan kerja baru (Agusalim & Novianti, 2023).

Menurut teori klasik, pasar tenaga kerja akan selalu mencapai keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja apabila upah bersifat fleksibel. Dalam pandangan ini, pengangguran yang terjadi hanyalah bersifat sukarela, yaitu mereka yang menolak bekerja pada tingkat upah yang berlaku. Jika terjadi ketidakseimbangan, pasar akan menyesuaikan diri dan kembali pada kondisi *full employment* dalam jangka pendek.

Namun, pandangan ini dikritisi oleh teori Keynesian. Menurut Keynes, pasar tenaga kerja tidak selalu seimbang karena upah bersifat kaku (tidak fleksibel ke bawah). Ketidakseimbangan ini menyebabkan

pengangguran yang dapat berlangsung terus-menerus. Keynes membedakan pengangguran menjadi tiga jenis:

- a. Pengangguran friksional (sementara akibat transisi antar pekerjaan),
- b. Pengangguran musiman (tergantung musim), dan
- c. Pengangguran institusional (akibat kebijakan atau struktur pasar).

Pandangan Keynesian sangat relevan dengan kondisi di Indonesia, di mana upah dan harga cenderung tidak fleksibel ke bawah. Kenaikan upah minimum yang tidak diiringi peningkatan produktivitas turut menahan laju permintaan tenaga kerja, sehingga menambah jumlah pengangguran (Pasaribu, 2014)

B. Kajian Penelitian Yang Relefan

1. Penelitian yang dilakukan Lina Marlina tahun 2022 yang menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Berdasarkan hasil regresi liner berganda, yaitu uji F hitung secara simultan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum bersama-sama mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Sedangkan berdasarkan uji T secara parsial indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.
2. Penelitian yang dilakukan Ni Kadek Dina Ambarini dan Ni Luh Karmini tahun 2022 yang menganalisis pengaruh IPM, upah minimum, dan PDRB Terhadap tingkat pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan IPM, Upah Minimum, dan PDRB secara simultan berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. IPM secara parsial berpengaruh negatif

dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. Upah Minimum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. PDRB secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Selvi Saputri dan Yefriza pada tahun 2025 menganalisis pengaruh upah minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di wilayah tersebut. Di beberapa daerah, kenaikan upah minimum justru memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap pengangguran, artinya dapat meningkatkan angka pengangguran. Sementara itu, IPM terbukti memiliki pengaruh negatif yang signifikan, yang berarti peningkatan IPM dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran. Adapun jumlah penduduk menunjukkan pengaruh negatif, namun tidak signifikan, terhadap pengangguran. Kesimpulannya, kenaikan upah minimum tidak selalu berdampak pada penurunan angka pengangguran, sementara peningkatan kualitas manusia melalui IPM berperan penting dalam mengurangi pengangguran di Kepulauan Riau.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Nurohman tahun 2024 yang berjudul Analisis Pengaruh PDRB, IPM, dan UMK Terhadap tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022 yang disebabkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah lebih banyak kearah padat teknologi daripada pemberdayaan pengembangan skill untuk mengatasi pengangguran. Sementara itu, variabel Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022. Dan variabel Upah Minimum Kab/Kota

- mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Intan tahun 2021 yang menganalisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap tingkat Pengangguran di Sulawesi Selatan. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Sedangkan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran.
 6. Penelitian yang dilakukan oleh Ainun Rohmah tahun 2019 yang menganalisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB (X1), Rata-Rata Lama Sekolah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap simultan atau berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel Tingkat Pengangguran terbuka (Y) di Provinsi Jawa Timur. Dari hasil pengujian uji t atau parsial yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa PDRB (X1) positif tidak signifikan terhadap variabel Tingkat Pengangguran (Y) di Provinsi Jawa Timur. Upah Minimum Kabupaten (X2) positif signifikan terhadap variabel Tingkat Pengangguran (Y) di Provinsi Jawa Timur. Dan variabel Indeks Pembangunan Manusia (X3) negatif tidak signifikan terhadap variabel Tingkat Pengangguran (Y) di Provinsi Jawa Timur.
 7. Penelitian yang dilakukan oleh Hasim dan Muhammad Safar Nasir tahun 2023 yang menganalisis Pengaruh PDRB, IPM, Jumlah Penduduk dan UMK Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah 2018-2022. Hasil penelitian menunjukkan PDRB dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah, sedangkan upah minimum berpengaruh positif

signifikan dan IPM memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah 2018-2022.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Hasim dan Indanazulfa Qurrota A'yun tahun 2025 yang menganalisis Pengaruh PDRB, IPM, Jumlah Penduduk dan UMK Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah. Jumlah Penduduk dan PDRB berpengaruh positif tidak signifikan, UMK berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah, sedangkan IPM memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah.

Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu:

Tabel 2.1
Tabel Persamaan Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Lina Marliana (2022)	Pengaruh IPM, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum terhadap TPT di Indonesia	Secara simultan berpengaruh negatif dan signifikan. Secara parsial, IPM berpengaruh tidak signifikan, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap TPT.	Penelitian ini menggunakan data kabupaten/kota di Provinsi Banten, IPM UHH LF SP2020, dan metode regresi panel.	Variabel independent dan dependent yang digunakan sama
2	Ni Kadek Dina Ambarini & Ni Luh Karmini (2022)	Pengaruh IPM, Upah Minimum, dan PDRB terhadap Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Secara simultan semua variabel independent berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran. Secara parsial, Upah Minimum berpengaruh signifikan, IPM dan PDRB berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran.	Objek penelitian ini di Provinsi Banten dan tahun yang digunakan dari 2020-2024, serta menggunakan IPM UHH LF SP2020	Variabel independent dan dependent yang digunakan sama, sam-sama meneliti pada tingkat kabupaten/kota
3	Selvi Saputri & Yefriza (2025)	Pengaruh Upah Minimum, IPM dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran di Kepulauan Riau	Secara bersamaan upah minimum, IPM serta jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Upah minimum berpengaruh positif signifikan, IPM negatif signifikan, dan jumlah penduduk negatif tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran.	Penelitian ini tidak menyertakan jumlah penduduk, menggunakan IPM UHH LF SP2020, dengan objek penelitian di Banten.	Sama-sama meneliti IPM dan Upah Minimum terhadap TPT.
4	Ade Nurohman (2024)	Pengaruh PDRB, IPM dan UMK terhadap TPT di Provinsi Jawa	PDRB tidak berpengaruh signifikan, IPM negatif signifikan, UMK positif signifikan terhadap	Fokus wilayah berbeda, menggunakan IPM (UHH LF SP2020), dan teknik	Variabel independent dan dependent yang

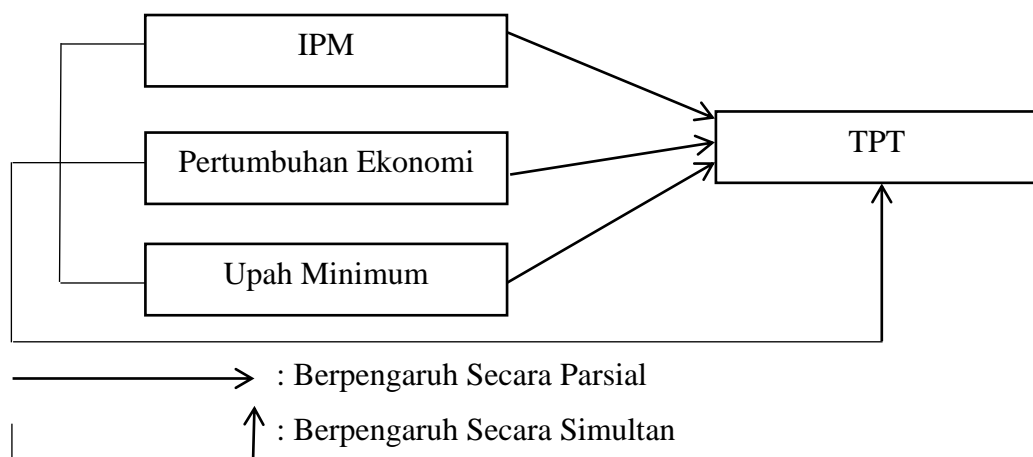
		Tengah	TPT.	regresi panel yang lebih komprehensif.	digunakan sama
5	Nur Intan (2021)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan IPM terhadap Tingkat Pengangguran di Sulawesi Selatan	Pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Sedangkan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran.	Penelitian ini menggunakan IPM terbaru dan analisis data panel pada wilayah Banten.	Variabel independent dan dependent yang digunakan sama
6	Ainun Rohmah (2019)	Pengaruh PDRB, UMK dan IPM terhadap TPT di Kabupaten/Kota Jawa Timur 2013-2017	Secara simultan semua variabel berpengaruh. Secara parsial PDRB tidak signifikan, UMK positif signifikan, IPM negatif tidak signifikan terhadap TPT.	Penelitian ini memakai data IPM terbaru dengan objek penelitian di banten tahun 2020-2024	Variabel independent dan dependent yang digunakan sama
7	Hasim & Muhammad Safar Nasir (2023)	Pengaruh PDRB, IPM, Jumlah Penduduk dan UMK terhadap TPT di Jawa Tengah 2018-2022	PDRB, jumlah penduduk, dan UMK berpengaruh positif, sedangkan IPM berpengaruh negatif terhadap TPT.	Penelitian ini tidak menyertakan jumlah penduduk dan berfokus di Provinsi Banten dengan pendekatan panel dan IPM terbaru, serta tahun terbaru (2020-2024)	Sama-sama meneliti pengaruh PDRB, IPM dan UMK terhadap TPT
8	Hasim dan Indanazulfa Qurrota A'yun (2025)	Pengaruh PDRB, IPM, Jumlah Penduduk dan UMK Terhadap TPT di Jawa Tengah	Jumlah Penduduk dan UMK berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah, sedangkan IPM memiliki pengaruh negatif terhadap TPT di Jawa Tengah.	Penelitian ini tidak menyertakan jumlah penduduk dan berfokus di Provinsi Banten dengan pendekatan panel dan IPM terbaru, serta tahun terbaru	Sama-sama meneliti pengaruh PDRB, IPM dan UMK terhadap TPT

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah landasan konseptual yang disusun berdasarkan fakta, observasi, teori, dan kajian pustaka untuk mendukung proses penelitian. Kerangka ini menjelaskan hubungan antara teori dan variabel penelitian, serta menjadi pedoman dalam merumuskan hipotesis. Kerangka berpikir berfungsi sebagai alat untuk menganalisis dan merumuskan argumentasi logis dalam penelitian, baik dalam pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang diperoleh melalui kajian teoritik berupa analisis deduktif yang masih bersifat kesimpulan sementara. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{01} : Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.

H_{a1} : Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.

- H₀₂ : Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.
- H_{a2} : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.
- H₀₃ : Upah Minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Provinsi Banten.
- H_{a3} : Upah Minimum berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.
- H₀₄ : Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.
- H_{a4} : Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu suatu metode penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk angka dengan memanfaatkan teknik statistik. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menguji hipotesis, menemukan hubungan antar variabel, atau membandingkan kelompok berdasarkan data yang dapat diukur (Sudaryana & Agusiady, 2022).

Menurut (Nurlan, 2019) metode kuantitatif memandang perilaku manusia sebagai sesuatu yang dapat diprediksi, objektif, dan terukur dalam kaitannya dengan realitas sosial. Alhasil, temuan yang diperoleh tidak menyimpang dari kenyataan karena penelitian kuantitatif menggunakan instrumen yang akurat dan dapat dipercaya serta analisis statistika yang tepat dan benar.

B. Tempat dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Banten dengan fokus pada data dari 8 kabupaten/kota dari tahun 2020-2024. Rancangan waktu penelitian yang telah peneliti rencanakan yaitu pada bulan Mei tahun 2025 hingga selesai.

Tabel 3.1
Rancangan Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags
1.	Penyusunan proposal					
2.	Bimbingan proposal					
3.	Seminar proposal					
4.	Penyusunan surat izin penelitian					
5.	Penelitian					
6.	Pengolahan data					
7.	Bimbingan skripsi					

8.	Siding munaqasah					
9.	Perbaiki setelah sidang					

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan seluruh objek penelitian yang mencakup makhluk hidup, benda, fenomena, nilai tes, atau kejadian yang menjadi sumber data dan menggambarkan karakteristik tertentu dalam suatu penelitian (Abdullah et al., 2022). Sedangkan sampel adalah bagian terpilih dari populasi yang diseleksi melalui metode sampling dalam sebuah penelitian (Rahman et al., 2022). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten. Karena jumlah wilayah administratif hanya 8 kabupaten/kota, maka penelitian ini menggunakan metode *sampling jenuh* atau total sampling.

Menurut Tohardi (2019) sampel jenuh atau total sampling adalah metode penetapan jumlah sampel dengan menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel, yang umumnya diterapkan ketika jumlah populasi relatif kecil, yaitu kurang dari 100. Dalam konteks ini, populasi yang berjumlah kurang dari 100 dianggap sebagai populasi kecil, sehingga pengambilan seluruh anggotanya dinilai lebih representatif untuk dianalisis secara menyeluruh. Teknik ini juga dikenal dengan istilah sensus yaitu karena semua unit dalam populasi dijadikan sampel selama periode pengamatan tahun 2020-2024.

1. Kabupaten Pandeglang
2. Kabupaten Lebak
3. Kabupaten Tangerang
4. Kabupaten Serang
5. Kota Tangerang
6. Kota Cilegon
7. Kota Serang
8. Kota Tangerang Selatan

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan kemudian digunakan oleh pengguna atau pihak yang berbeda dari pengumpul data asli (Herawati & Oktavianoor, 2022). Sumber data sekunder dapat diperoleh dari dalam perusahaan itu sendiri (sumber internal), berbagai situs internet, perpustakaan umum, lembaga pendidikan, pembelian dari perusahaan yang khusus menyediakan data sekunder, serta sumber lainnya (Hermawan, 2015).

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten yaitu data indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten/kota dan tingkat pengangguran terbuka. Data yang digunakan berupa data *cross section* yang terdiri dari 8 kabupaten/kota dan data *time series* dengan rentang waktu dari tahun 2020-2024.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau metode yang sistematis digunakan untuk mendapatkan informasi (data) yang valid dan dapat dipercaya terkait variabel-variabel dalam penelitian (Djaali, 2020). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan cara mengambil data sekunder dari *website* resmi badan pusat statistik provinsi Banten.

Menurut Anggito & Setiawan (2018) teknik dokumentasi diterapkan ketika peneliti menggunakan data sekunder dalam penelitiannya. Teknik ini berarti mengumpulkan data dengan mencatat atau mengambil informasi yang sudah tersedia dalam dokumen atau arsip. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek penelitian sendiri atau oleh pihak lain mengenai subjek tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik agar data tersusun secara sistematis dan sesuai kebutuhan untuk menjawab permasalahan penelitian atau menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel.

Menurut Kurniawan (2019) regresi data panel merupakan kombinasi antara regresi deret waktu (*time series*) dan regresi lintas individu (*cross section*), dimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen terjadi pada periode waktu yang berbeda dan pada sampel yang berbeda pula. Jika kondisi tersebut ada, maka regresi data panel menjadi solusi yang tepat.

Analisis data menggunakan regresi data panel dengan menggunakan urutan analisis sebagai berikut:

1. Uji Pemilihan Model

- a. Uji Chow untuk memilih antara *common effects model* dan *fixed effects model*

Hipotesis nol (H_0) menyatakan bahwa model yang tepat adalah *Common Effects Model* (CEM), sedangkan hipotesis alternatif (H_1) menyatakan bahwa model yang lebih cocok adalah *Fixed Effects Model* (FEM). H_0 akan ditolak jika nilai probabilitas dari uji F lebih kecil dari tingkat signifikansi α , yaitu 5%. Dengan kata lain, jika nilai p-value dari uji F kurang dari 0,05, maka model *Fixed Effects* dianggap lebih sesuai dibandingkan dengan model *Common Effects*, dan begitu pula sebaliknya.

- b. Uji Hausman untuk memilih antara *fixed effects model* dan *random effects model*

Hipotesis nol (H_0) menyatakan bahwa model yang tepat adalah *Random Effects Model* (REM), sedangkan hipotesis alternatif (H_1) menyatakan bahwa model *Fixed Effects Model* (FEM) lebih cocok. Apabila nilai p-value dari uji Chi-Square kurang dari 0,05,

maka model *Fixed Effects* dianggap lebih baik daripada model *Random Effects*, sehingga pengujian selanjutnya dengan uji Lagrange Multiplier tidak diperlukan. Namun, jika *p-value* dari Chi-Square lebih dari 0,05, model *Random Effects* lebih disarankan dan perlu dilakukan uji *Lagrange Multiplier* untuk langkah berikutnya.

- c. Uji *Lagrange Multiplier* untuk memilih antara *random effect model* dan *common effect model*

Apabila nilai *p-value* dari uji *Breusch-Pagan* kurang dari 0,05, maka *Random Effects model* (REM) dianggap lebih baik dibandingkan *Common Effects model* (CEM). Sebaliknya, jika nilai *p-value* dari *Breusch-Pagan* lebih besar dari 0,05, maka model *Common Effects* lebih tepat digunakan dibandingkan model *Random Effects* (Badawi et al., 2022).

2. Metode Estimasi Data Panel

a. *Common Effect Model* (CEM)

Merupakan Model data panel yang paling dasar menggabungkan data deret waktu (*time series*) dan data penampang (*cross section*) tanpa memperhatikan perbedaan antar waktu maupun antar individu. Dalam pendekatan ini, diasumsikan bahwa perilaku setiap entitas, seperti perusahaan, tetap sama sepanjang waktu. Estimasi model dilakukan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil (Basuki, 2021).

b. *Fixed Effect Model* (FEM)

Model ini berasumsi bahwa variasi antar individu dapat direpresentasikan melalui perbedaan nilai intersep. Untuk mengestimasi model data panel dengan pendekatan *Fixed Effects*, digunakan variabel dummy guna menangkap variasi intersep antar entitas, seperti perusahaan. Perbedaan intersep ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti budaya kerja, gaya manajemen, dan sistem insentif yang berbeda. Meskipun demikian, kemiringan garis regresi

(slope) diasumsikan tetap sama untuk semua perusahaan. Pendekatan ini juga dikenal sebagai metode *Least Squares Dummy Variable* (LSDV) (Basuki & Prawoto, 2023).

c. *Random Effect Model* (REM)

Model ini lebih sesuai digunakan untuk menganalisis data panel dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Hal ini karena model ini mampu mengestimasi kondisi di mana gangguan (error) dapat saling berkorelasi, baik antar waktu maupun antar individu. Dalam pendekatan *Random Effect*, perbedaan nilai intersep antar perusahaan ditangani melalui komponen error masing-masing entitas. Salah satu keunggulan dari model ini adalah kemampuannya dalam mengatasi masalah heteroskedastisitas. Model ini juga dikenal sebagai *Error Component Model* (ECM) atau menggunakan pendekatan *Generalized Least Squares* (GLS) (Kusumaningtyas et al., 2022).

3. Uji Asumsi Klasik

Model penelitian yang baik harus memenuhi asumsi klasik. Hal ini penting agar dalam proses analisis tidak ditemukan permasalahan statistik yang dapat memengaruhi validitas hasil. Uji asumsi klasik biasanya dilakukan dengan pendekatan *Ordinary Least Squares* (OLS). Tujuan utama dari uji asumsi klasik adalah untuk memastikan bahwa parameter penduga yang digunakan dalam model bersifat sah (valid) dan tidak bias. Selain itu, uji ini juga berfungsi untuk mengetahui apakah model regresi yang dibangun benar-benar mencerminkan hubungan yang signifikan dan representatif antar variabel.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dalam model memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Secara khusus, uji ini digunakan untuk menguji apakah nilai residual atau gangguan dalam model regresi menyebar secara normal. Asumsi normalitas residual penting karena uji statistik seperti uji t dan uji F

mengasumsikan bahwa residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, maka hasil pengujian statistik bisa menjadi tidak valid atau menyesatkan.

Salah satu metode yang umum digunakan untuk menguji normalitas residual adalah Uji Jarque-Bera (JB). Uji ini dirancang untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal berdasarkan nilai *skewness* (kemencengan) dan *kurtosis* (keruncingan) dari data. Uji Jarque-Bera lebih tepat digunakan untuk sampel besar karena sifatnya yang *asymptotic*. Alasan pemilihan uji ini adalah karena uji ini memiliki keunggulan yaitu sifatnya yang praktis, sederhana, serta banyak digunakan dalam penelitian ekonometrika karena mampu mendeteksi penyimpangan distribusi normal dengan baik, terutama pada ukuran sampel yang relatif besar.

Menurut Misbahuddin (2013) Berdasarkan ukuran sampel, pengujian hipotesis dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, pengujian hipotesis dengan sampel besar, yaitu apabila jumlah sampel yang digunakan lebih dari 30 ($n > 30$). Kedua, pengujian hipotesis dengan sampel kecil, yaitu apabila jumlah sampel yang digunakan kurang dari atau sama dengan 30 ($n \leq 30$).

Adapun kriteria pengambilan keputusan dalam uji Jarque-Bera adalah jika nilai probabilitas (p-value) dari uji Jarque-Bera lebih besar dari tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$), maka residual dianggap memiliki distribusi normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka residual tidak berdistribusi normal.

b. Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antar variabel independen dalam model regresi panel. Model yang ideal adalah model tanpa adanya korelasi antara variabel-variabel bebas. Multikolinearitas muncul ketika variabel independen memiliki korelasi yang tinggi satu sama lain, sehingga menyulitkan untuk mengisolasi pengaruh masing-

masing variabel terhadap variabel dependen. Hal ini terjadi karena perubahan pada satu variabel cenderung diikuti oleh perubahan pada variabel lain yang berkorelasi tinggi dengannya.

Beberapa indikator adanya multikolinearitas antara lain:

- 1) Nilai koefisien determinasi (R^2) sangat tinggi (lebih dari 0,8), tetapi hanya sedikit atau tidak ada variabel bebas yang signifikan secara statistik berdasarkan uji t.
- 2) Nilai F-statistik signifikan, namun t-statistik dari masing-masing variabel independen tidak signifikan.

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, dapat dilakukan dengan melihat matriks korelasi antar variabel bebas. Jika ditemukan nilai koefisien korelasi lebih dari 0,80, maka hal tersebut mengindikasikan adanya multikolinearitas (Panjawa & Sugiarti, 2020).

c. Heteroskedastisitas

Menurut Sa'adah & Nur'ainui (2020), uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi memiliki varians yang tetap (konstan) atau tidak. Pengujian ini penting dilakukan karena keberadaan heteroskedastisitas dapat menyebabkan hasil uji t dan uji f menjadi tidak akurat. Heteroskedastisitas mengacu pada kondisi di mana varians dari error (gangguan) tidak konstan, sedangkan homoskedastisitas berarti semua error memiliki varians yang sama. Salah satu asumsi dasar dalam metode *Ordinary Least Squares* (OLS) adalah bahwa error harus bersifat homoskedastis. Jika model mengalami heteroskedastisitas, maka estimator yang dihasilkan oleh OLS tidak lagi memiliki varian terkecil, sehingga tidak memenuhi sifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan Uji White. Menurut Wijaya et al., (2024) uji white (*White's General Heteroscedasticity Test*) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Uji ini tergolong sederhana

karena menganalisis nilai residual dari model regresi, kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan distribusi Chi-Square.

Pengujian dilakukan dengan menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Varians residual bersifat konstan (tidak terjadi heteroskedastisitas).

H_a : Varians residual tidak konstan (terjadi heteroskedastisitas).

Kriteria pengambilan keputusan dalam uji ini didasarkan pada nilai probabilitas (Prob.) dari Chi-square. Apabila nilai Prob. Chi-square $> 0,05$, maka H_0 diterima, yang berarti varians residual bersifat konstan dan model tidak mengalami heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai Prob. Chi-square $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak, yang mengindikasikan adanya heteroskedastisitas dalam model (Marbun, 2017).

d. Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara nilai residual (kesalahan) pada suatu periode dengan nilai residual pada periode sebelumnya. Dalam model regresi linear, autokorelasi biasanya terjadi ketika data disusun secara runtut waktu (*time series*) dan setiap observasi saling berkaitan. Autokorelasi muncul karena adanya ketergantungan antara residual pada periode ke- t dengan residual pada periode ke- $(t-1)$. Jika autokorelasi tidak ditangani, maka hasil estimasi bisa menjadi tidak efisien, bahkan menyesatkan.

Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi autokorelasi antara lain: Uji Durbin-Watson (DW), Run Test, Uji statistik Q, dan Uji Lagrange Multiplier (LM), terutama untuk jumlah observasi yang besar (lebih dari 100 data). Dari berbagai metode tersebut, uji Durbin-Watson adalah yang paling umum digunakan. Uji ini akan menghasilkan nilai statistik DW yang kemudian dibandingkan dengan nilai batas bawah (dL) dan batas atas (dU) dari tabel Durbin-

Watson. Kriteria pengambilan kesimpulan dalam uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $DW < dL \rightarrow$ terdapat autokorelasi positif.
- 2) Jika $DW > 4 - dL \rightarrow$ terdapat autokorelasi negatif.
- 3) Jika $dU < DW < 4 - dU \rightarrow$ tidak terdapat autokorelasi.
- 4) Jika $dL < DW < dU$ atau $4 - dU < DW < 4 - dL \rightarrow$ hasil uji bersifat tidak pasti (*inconclusive*).

4. Persamaan Regresi Data Panel

Model persamaan data panel ini menggabungkan data *cross section* dan data *time series* seperti berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Dimana:

Y_{it} = Variabel dependent (Tingkat Pengangguran Terbuka)

α = konstanta

e = *error term*

t = *time series*

I = *cross section*

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independent

$X_1 X_2 X_3$ = Variabel independent (IPM, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum)

5. Uji Hipotesis dan Analisis Determinasi

a. Uji T

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial atau individu terhadap masing-masing variabel bebas, khususnya ketika terdapat lebih dari satu variabel independen dalam model. Nilai t diperoleh dari output koefisien regresi. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung (t_0) dengan nilai t tabel (nilai kritis t) berdasarkan tingkat signifikansi tertentu, misalnya 0,05. Jika t hitung lebih besar dari t tabel, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis

alternatif (H_a) diterima. Sebaliknya, jika t hitung lebih kecil dari t tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

b. Uji F

Nilai f yang terdapat pada output digunakan untuk menguji hipotesis secara simultan, yaitu untuk menilai apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung (F_0) dengan nilai F tabel (nilai kritis F) pada tingkat signifikansi tertentu, misalnya 0,05. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Sebaliknya, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Nilai F memiliki hubungan positif dengan nilai R^2 , sehingga ketika nilai R^2 meningkat, nilai f juga cenderung meningkat. Sebaliknya, jika nilai R^2 menurun, maka nilai f juga akan menurun. Dengan demikian, pengujian hipotesis menggunakan nilai f tidak hanya berfungsi untuk menguji signifikansi keseluruhan model regresi yang diestimasi, tetapi juga dapat digunakan untuk menguji signifikansi dari nilai R^2 itu sendiri (Sarwono, 2016).

c. Analisis Determinasi (Adjusted R Square)

Nilai determinasi (R^2) menggambarkan seberapa besar persentase variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1, di mana nilai 0 menunjukkan bahwa variabel bebas secara keseluruhan tidak mampu menjelaskan variabel dependen, sedangkan nilai 1 berarti variabel bebas dapat menjelaskan variabel dependen secara sempurna. Adjusted R Square adalah nilai R^2 yang sudah dikoreksi untuk mengatasi kelemahan R^2 , karena R^2 cenderung selalu meningkat jika jumlah variabel bebas ditambah, sementara Adjusted R Square tidak selalu meningkat dengan penambahan variabel baru. Nilai Adjusted R Square

biasanya digunakan pada model regresi yang melibatkan tiga atau lebih variabel independent (Priyatno, 2022).

Penelitian ini menggunakan nilai adjusted R Square karena melibatkan tiga variabel independent. Nilai Adjusted R-Square yang dihasilkan mencerminkan seberapa besar proporsi variasi tingkat pengangguran terbuka yang benar-benar dapat dijelaskan oleh IPM, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum secara bersama-sama.

Untuk mengukur besarnya korelasi yang dihasilkan dari analisis, digunakan koefisien korelasi yang menunjukkan tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai koefisien korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa perubahan pada variabel bebas cenderung diikuti oleh perubahan pada variabel terikat, sedangkan nilai yang rendah mengindikasikan hubungan yang lemah atau hampir tidak ada (Siagian & Silviani, 2023). Berdasarkan pedoman interpretasi koefisien korelasi menurut Sugiyono, kekuatan hubungan dapat dikategorikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten, yang secara administratif terdiri dari 4 kabupaten (Pandeglang, Lebak, Tangerang, dan Serang) serta 4 kota (Tangerang, Cilegon, Serang, dan Tangerang Selatan) dengan pusat pemerintahan berada di Kota Serang. Provinsi Banten, terletak di ujung barat Pulau Jawa, Indonesia, memiliki luas wilayah sekitar 9.160,70 km² berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 yang juga menjadi dasar pembentukannya. Sebelumnya, Banten merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat hingga resmi berdiri sendiri pada tahun 2000.

Gambar 4.1
Peta Wilayah Provinsi Banten



Secara geografis, Banten memiliki posisi strategis. Wilayah ini dikelilingi Laut Jawa di utara, Selat Sunda di barat, Samudra Hindia di

selatan, dan berbatasan langsung dengan DKI Jakarta serta Provinsi Jawa Barat di timur.

Posisi ini menjadikan Banten sebagai pintu gerbang penghubung Pulau Jawa dan Sumatra, serta bagian penting dari sirkulasi perdagangan Asia dan internasional, termasuk jalur strategis di Selat Sunda yang sering dilalui kapal besar dari Australia dan Selandia Baru menuju Asia Tenggara.

Dari segi perekonomian, Banten merupakan salah satu wilayah dengan banyak kawasan industri. Wilayah Tangerang Raya (Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan) berperan penting sebagai zona penyangga bagi Jakarta. Banten juga memiliki pelabuhan-pelabuhan laut strategis yang terus dikembangkan untuk mengurangi beban pelabuhan di Jakarta dan menjadi alternatif bagi pelabuhan internasional seperti Singapura.

Selain itu, kekayaan sumber daya alam dan potensi geografis membuat Provinsi Banten menjadi lokasi yang ideal untuk aglomerasi perekonomian, perdagangan, dan pengembangan organisasi ekonomi. Letaknya yang berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) semakin menegaskan pentingnya wilayah ini dalam perdagangan nasional dan internasional.

B. Deskripsi Data

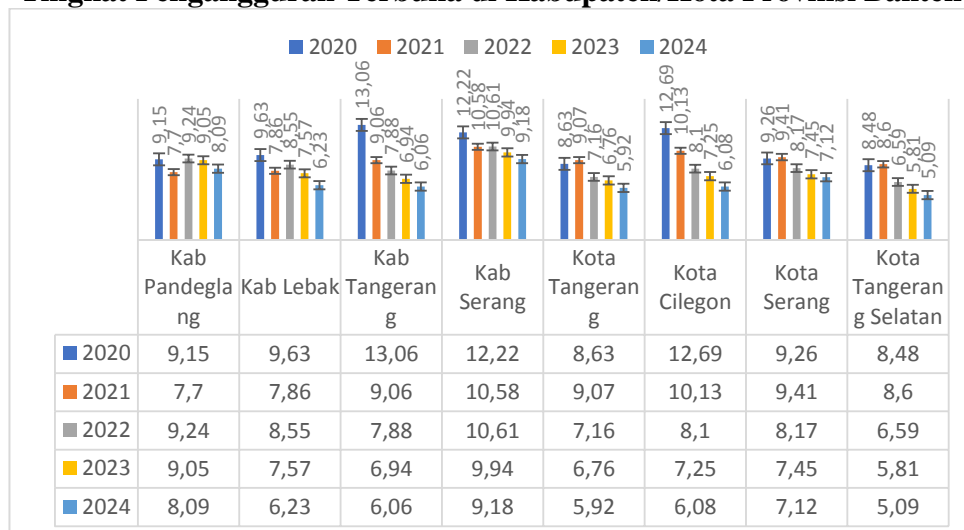
Deskripsi data penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Banten selama periode 2020–2024. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten dan mencakup 8 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan.

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didefinisikan sebagai persentase jumlah penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan, terhadap total jumlah angkatan kerja di suatu wilayah tertentu. TPT

merupakan indikator penting untuk melihat kondisi dan kinerja pasar tenaga kerja serta perekonomian secara umum.

Grafik 4.2
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten



Sumber: Website BPS Banten

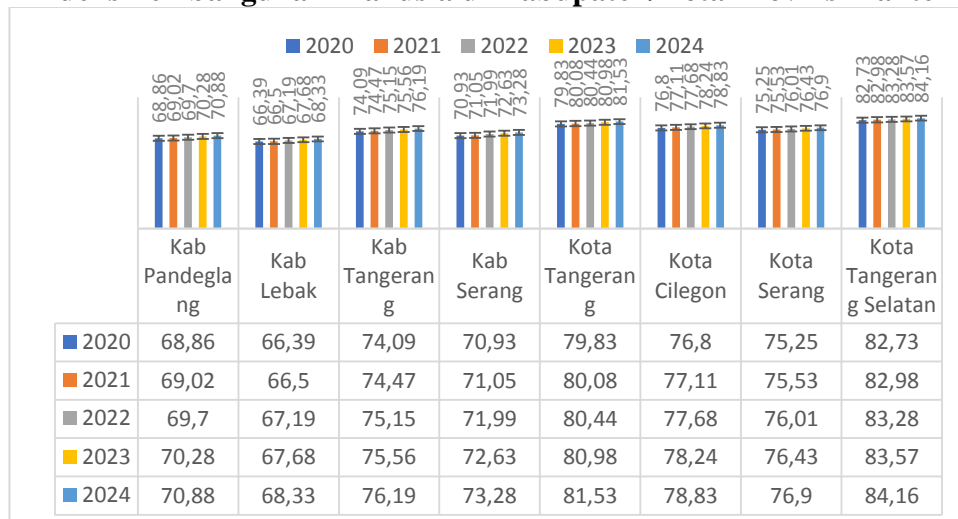
Berdasarkan data dari BPS di atas Provinsi Banten mencatatkan TPT yang tinggi secara nasional, dengan rata-rata 8,38% selama periode 2020-2024, jauh di atas rata-rata nasional (5,93%). Tren TPT menunjukkan penurunan selama lima tahun terakhir, namun angkanya masih tergolong tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Seperti, di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 mencatat TPT 13,06% turun menjadi 6,06% pada tahun 2024. Di Kabupaten Serang pada tahun 2020 mencatat TPT 12,20% turun menjadi 9,18% pada tahun 2024. Sedangkan di Kota Tangerang Selatan mencatat TPT 8,48% pada tahun 2020 turun menjadi 5,09% pada tahun 2024, menjadi eilayah dengan TPT terendah di Banten pada 2024. Meskipun ada penurunan, disparitas TPT antar kabupaten/kota masih terlihat jelas, menunjukkan ketimpangan dalam pembangunan dan penyerapan tenaga kerja di wilayah Banten.

2. Indeks Pembnagunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit yang mengukur keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup

sehat (harapan hidup saat lahir), pengetahuan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta standar hidup layak (Pendapatan Nasional Bruto per kapita). Data IPM (menggunakan UHH LF SP2020) diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten.

Grafik 4.3
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Banten



Sumber: Website BPS Banten

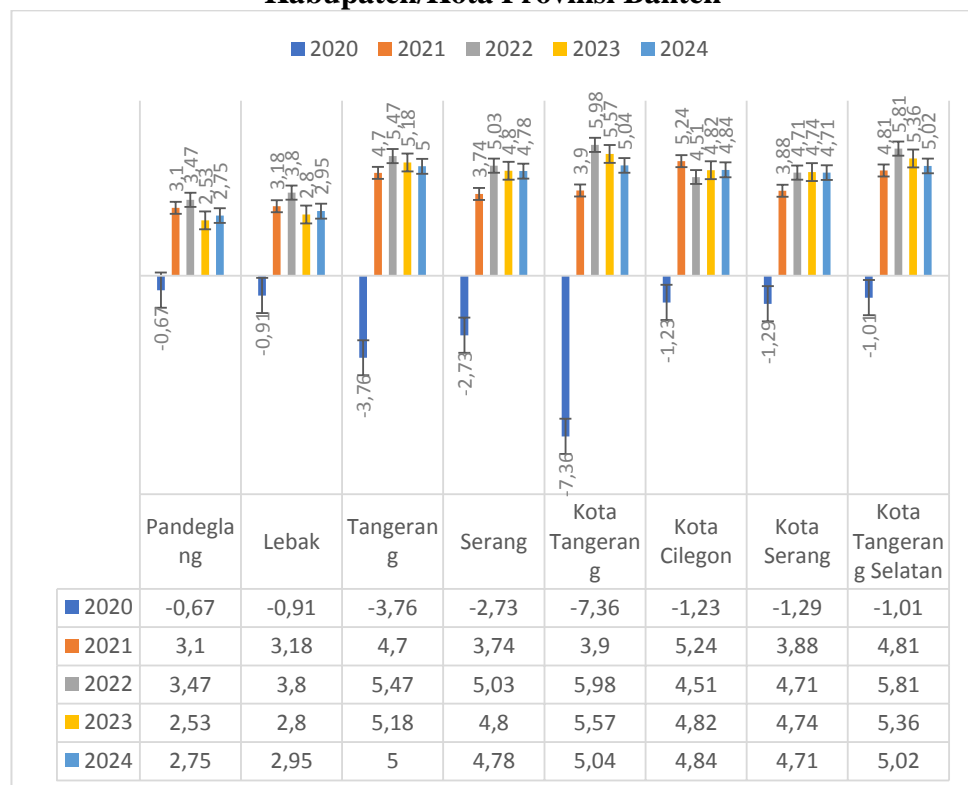
Provinsi Banten menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembangunan manusia, dengan IPM yang konsisten meningkat dari 74,41 (2020) menjadi 76,35 (2024). Peningkatan IPM Banten melampaui rata-rata nasional (72,81 – 75,02) pada periode yang sama. Seperti, di Kota Tangerang Selatan IPM tertinggi (84,16 pada 2024) dan Kabupaten Lebak IPM terendah (68,33 pada 2024). Meskipun IPM meningkat, fenomena yang menarik adalah TPT di beberapa wilayah (seperti Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang) tetap tinggi atau fluktuatif, menunjukkan bahwa peningkatan IPM belum secara langsung menurunkan angka pengangguran secara signifikan.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi diukur melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, yaitu persentase perubahan PDRB dari satu tahun ke tahun sebelumnya.

Indikator ini menggambarkan tingkat perkembangan pendapatan agregat suatu wilayah secara riil.

Grafik 4.4
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten/Kota Provinsi Banten



Sumber: Website BPS Banten

Pada tahun 2020, hampir seluruh wilayah di Provinsi Banten mengalami kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19, dengan Provinsi Banten secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar -3,39%. Sejak 2021 hingga 2024, tren pertumbuhan PDRB di Banten menunjukkan pemulihan dan stabil, dengan rata-rata pertumbuhan provinsi sekitar 4,79% pada 2024.

Seperti di Kota Tangerang Selatan mencatat laju pertumbuhan tertinggi pada 2022 (5,81%). Kabupaten Serang Pertumbuhan ekonomi 4,78% pada 2024, namun TPT masih tinggi (9,18%). Kota Cilegon PDRB tumbuh 4,84% pada 2024, tetapi TPT masih 6,08%. Kondisi ini mengindikasikan adanya fenomena jobless growth di beberapa wilayah

Banten, di mana pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh penciptaan lapangan kerja yang memadai.

4. Upah Minimum

Upah Minimum adalah standar upah terendah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja. Pada tingkat kabupaten/kota, disebut Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan oleh gubernur. UMK di Provinsi Banten secara umum mengalami kenaikan setiap tahunnya selama periode 2020-2024.

Tabel 4.1
Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kab Pandeglang	2.758.909	2.800.293	2.800.293	2.980.351	3.010.929
Kab Lebak	2.710.654	2.751.314	2.773.590	2.944.665	2.978.764
Kab Tangerang	4.168.268	4.230.793	4.230.793	4.527.689	4.601.988
Kab Serang	4.152.887	4.215.181	4.215.181	4.492.961	4.560.894
Kota Tangerang	4.199.029	4.262.015	4.285.799	4.584.519	4.760.289
Kota Cilegon	4.246.081	4.309.773	4.340.254	4.657.223	4.815.102
Kota Serang	3.773.940	3.830.549	3.850.526	4.090.799	4.148.602
Kota Tangerang Selatan	4.168.268	4.230.793	4.280.214	4.551.452	4.670.791

Sumber: Website BPS Banten

Di Kabupaten Pandeglang UMK stagnan pada 2021-2022 (Rp2.800.293), namun TPT justru meningkat dari 7,7% menjadi 9,24%. Kabupaten Tangerang UMK stagnan pada periode yang sama (Rp4.230.793), namun TPT berhasil menurun dari 9,06% menjadi 7,88%. Sedangkan di Kota Cilegon: UMK konsisten naik dari Rp4.246.081 (2020) menjadi Rp4.815.102 (2024), seiring dengan penurunan TPT dari 12,69% menjadi 6,08%. Hubungan antara UMK dan TPT menunjukkan pola yang tidak seragam dan kompleks, bervariasi tergantung pada karakteristik ekonomi dan ketenagakerjaan masing-masing daerah.

C. Hasil Analisis Data

1. Hasil Uji Pemilihan Model

a. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang paling tepat antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka model *Fixed Effects* dianggap lebih sesuai dibandingkan dengan model *Common Effects*, dan begitu pula sebaliknya.

Tabel 4.2
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.119258	(7,29)	0.0001
Cross-section Chi-square	40.002349	7	0.0000

Sumber: Data Diolah Menggunakan Eviews 12

Karena nilai probabilitas yang dihasilkan adalah 0,00, atau lebih kecil dari batas signifikan 0,05, maka FEM dinyatakan lebih tepat digunakan dibandingkan model CEM. Karena model yang terpilih adalah FEM, maka harus dilanjutkan ke uji berikutnya yaitu uji Hausman.

b. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model yang paling tepat antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM).

Tabel 4.3
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	37.500016	3	0.0000

Sumber: Data Diolah Menggunakan Eviews 12

Karena nilai probabilitas yang dihasilkan adalah 0,00, atau lebih kecil dari batas signifikan 0,05, maka model FEM dinyatakan lebih tepat digunakan dibandingkan model REM. Karena model yang terpilih adalah FEM, maka uji *Lagrange Multiplier* atau uji LM tidak perlu dilakukan.

2. Metode Estimasi Data Panel

Berdasarkan uji chow dan uji hausman, maka model yang terbaik dalam penelitian ini adalah FEM. *Fixed Effect Model* (FEM) adalah salah satu metode estimasi dalam regresi data panel yang mengasumsikan bahwa setiap unit *cross-section* (dalam hal ini kabupaten/kota) memiliki intersep atau karakteristik khusus yang bersifat tetap (konstan) selama periode waktu pengamatan yaitu tahun 2020-2024. Artinya, FEM memungkinkan adanya perbedaan karakteristik antar daerah, namun tetap mengasumsikan bahwa karakteristik tersebut tidak berubah dari tahun ke tahun.

Tabel 4.4
Hasil Regresi Data Panel Model FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	53.57541	31.13397	1.720803	0.0959
X1	-0.374496	0.499465	-0.749794	0.4594
X2	-0.160242	0.061314	-2.613478	0.0141
X3	-4.18E-06	1.95E-06	-2.144870	0.0405
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.804655	Mean dependent var	8.409250	
Adjusted R-squared	0.737295	S.D. dependent var	1.833780	
S.E. of regression	0.939900	Akaike info criterion	2.942330	
Sum squared resid	25.61896	Schwarz criterion	3.406772	
Log likelihood	-47.84661	Hannan-Quinn criter.	3.110258	
F-statistic	11.94553	Durbin-Watson stat	1.721035	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data Diolah Menggunakan Eviews 12

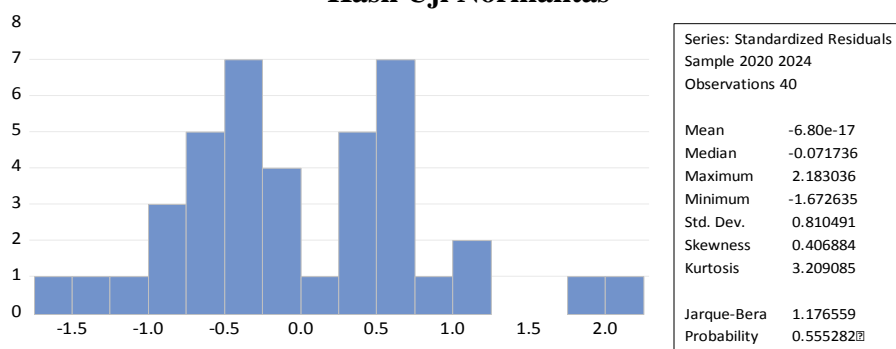
3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji Noemalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal. Hal ini penting dilakukan karena salah satu asumsi dasar dalam regresi linear klasik adalah bahwa residual harus berdistribusi normal, terutama ketika analisis dilakukan dengan pendekatan *Ordinary Least Squares* (OLS).

Gambar 4.5
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data Diolah Menggunakan Eviews 12

Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,555282, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model ini berdistribusi normal, sehingga lulus uji normalitas.

b. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linier yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Jika dua atau lebih variabel bebas memiliki korelasi tinggi (umumnya $> 0,80$), maka dapat terjadi multikolinearitas yang akan mengganggu kestabilan model dan akurasi estimasi koefisien regresi.

Tabel 4.6
Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.213644	0.787308
X2	0.213644	1.000000	0.268165
X3	0.787308	0.268165	1.000000

Sumber: Data Diolah Menggunakan Eviews 12

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh:

- 1) Koefisien korelasi antara X1 (IPM) dan X2 (Pertumbuhan Ekonomi) sebesar 0,213644
- 2) Koefisien korelasi antara X1 (IPM) dan X3 (Upah Minimum) sebesar 0,787308
- 3) Koefisien korelasi antara X2 (Pertumbuhan Ekonomi) dan X3 (Upah Minimum) sebesar 0,268165

Ketiga nilai korelasi tersebut semuanya lebih kecil dari 0,80, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan linier yang kuat antar variabel independen dalam model. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas.

c. Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah varians residual dalam model regresi bersifat konstan (homoskedastis) atau tidak. Heteroskedastisitas merupakan salah satu pelanggaran terhadap asumsi klasik dalam regresi linear, yang dapat menyebabkan estimasi parameter menjadi tidak efisien.

Tabel 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	1.082475	Prob. F(9,30)	0.4038
Obs*R-squared	9.805451	Prob. Chi-Square(9)	0.3665
Scaled explained SS	6.009177	Prob. Chi-Square(9)	0.7390

Sumber: Data Diolah Menggunakan Eviews 12

Pada penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan Uji White. Berdasarkan hasil output White Test, diperoleh nilai

probabilitas Chi-Square (Obs*R-squared) sebesar 0,3665, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis nol diterima, artinya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

d. Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi antara residual satu observasi dengan observasi lainnya, terutama dalam data runtun waktu atau panel. Autokorelasi dapat menyebabkan hasil estimasi regresi menjadi tidak efisien, walaupun tetap tidak bias, serta dapat mempengaruhi validitas uji statistik.

Tabel 4.8
Hasil Uji Autokorelasi

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.804655	Mean dependent var	8.409250
Adjusted R-squared	0.737295	S.D. dependent var	1.833780
S.E. of regression	0.939900	Akaike info criterion	2.942330
Sum squared resid	25.61896	Schwarz criterion	3.406772
Log likelihood	-47.84661	Hannan-Quinn criter.	3.110258
F-statistic	11.94553	Durbin-Watson stat	1.721035
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data Diolah Menggunakan Eviews 12

Dalam penelitian ini, pengujian autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai Durbin-Watson (DW). Berdasarkan hasil estimasi regresi, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,721035. Berdasarkan tabel Durbin-Watson, diperoleh Nilai dL = 1,3384 dan Nilai dU = 1,6589. Karena nilai DW sebesar 1,721035 berada di antara dU (1,6589) dan 4 – dU (2,3411), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi ini.

4. Persamaan Regresi Data Panel

$$Y = 53.575413528 - 0.374495981209 * X1 - 0.160242044253 * X2 - 4.17955570253e-06 * X3 + [CX=F]$$

Disederhana menjadi:

$$Y = 53,58 - 0,37X_1 - 0,16X_2 - 0,00000418X_3 + e$$

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 53,58 artinya tanpa adanya variabel IPM (X_1), Pertumbuhan Ekonomi (X_2) dan Upah Minimum (X_3) maka variabel Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan sebesar 53,58%.
- b. Nilai koefisien beta variabel IPM (X_1) sebesar -0,37, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_1 mengalami peningkatan 1 satuan, maka variabel TPT (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,37%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_1 mengalami penurunan 1 satuan maka variabel TPT (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,37%.
- c. Nilai koefisien beta variabel Pertumbuhan Ekonomi (X_2) sebesar -0,16, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_2 mengalami peningkatan 1 satuan, maka variabel TPT (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,16%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_2 mengalami penurunan 1 satuan maka variabel TPT (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,16%.
- d. Nilai koefisien beta variabel Upah Minimum (X_3) sebesar -0,00000418, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_3 mengalami peningkatan 1 satuan, maka variabel TPT (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,00000418%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_3 mengalami penurunan 1 satuan maka variabel TPT (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,00000418%.

5. Uji Hipotesis dan Analisis Determinasi

a. Uji T

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial atau individu terhadap masing-masing variabel bebas, khususnya ketika terdapat lebih dari satu variabel independen dalam model.

Tabel 4.9
Hasil Uji T

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 06/22/25 Time: 21:29
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 8
Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	53.57541	31.13397	1.720803	0.0959
X1	-0.374496	0.499465	-0.749794	0.4594
X2	-0.160242	0.061314	-2.613478	0.0141
X3	-4.18E-06	1.95E-06	-2.144870	0.0405

Sumber: Data Diolah Menggunakan Eviews 12

Pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil uji t pada variabel indeks pembangunan manusia (X1) diperoleh t hitung sebesar 0,749794 yang lebih kecil dari t tabel 2,02809 dengan nilai prob. 0,4594 > 0,05 maka H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya variabel IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2020-2024.
- 2) Hasil uji t pada variabel Pertumbuhan Ekonomi (X2) diperoleh t hitung sebesar 2,613478 yang lebih besar dari t tabel 2,02809 dengan nilai prob. 0,0141 < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2020-2024.
- 3) Hasil uji t pada variabel Upah Minimum (X3) diperoleh t hitung sebesar 2,144870 yang lebih besar dari t tabel 2.02809 dengan nilai

prob. $0,0405 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel Upah Minimum berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2020-2024.

b. Uji F

Nilai f yang terdapat pada output digunakan untuk menguji hipotesis secara simultan, yaitu untuk menilai apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.10
Hasil Uji F

R-squared	0.804655	Mean dependent var	8.409250
Adjusted R-squared	0.737295	S.D. dependent var	1.833780
S.E. of regression	0.939900	Akaike info criterion	2.942330
Sum squared resid	25.61896	Schwarz criterion	3.406772
Log likelihood	-47.84661	Hannan-Quinn criter.	3.110258
F-statistic	11.94553	Durbin-Watson stat	1.721035
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data Diolah Menggunakan Eviews 12

Berdasarkan hasil regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) didapatkan nilai F hitung sebesar 11,945 yang lebih besar dari f tabel 2,886 dengan nilai Prob(F-Statistik) $0,000000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2020-2024.

c. Analisis Determinasi

Nilai determinasi menggambarkan seberapa besar persentase variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Nilai ini berkisar antara 0 sampai 1, di mana nilai 0 menunjukkan bahwa variabel bebas secara keseluruhan tidak mampu menjelaskan

variabel dependen, sedangkan nilai 1 berarti variabel bebas dapat menjelaskan variabel dependen secara sempurna.

Tabel 4.11
Hasil Analisis Determinasi

R-squared	0.804655	Mean dependent var	8.409250
Adjusted R-squared	0.737295	S.D. dependent var	1.833780
S.E. of regression	0.939900	Akaike info criterion	2.942330
Sum squared resid	25.61896	Schwarz criterion	3.406772
Log likelihood	-47.84661	Hannan-Quinn criter.	3.110258
F-statistic	11.94553	Durbin-Watson stat	1.721035
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data Diolah Menggunakan Eviews 12

Berdasarkan hasil regresi data panel diatas, nilai adjusted R-Square sebesar 0,737295. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independent yang terdiri dari IPM, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum mampu menjelaskan variabel Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten sebesar 0,737295 atau 73,7295%. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara variabel-variabel independen dan variabel dependen tergolong kuat, sedangkan sisanya 26,2705% (100 – nilai adjusted R-Square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Nilai koefisien sebesar 0,737 dapat dikategorikan kuat atau tinggi, yang mengindikasikan bahwa model penelitian memiliki kemampuan penjelasan yang kuat terhadap variasi data. Semakin mendekati angka 1, semakin besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dengan demikian, model yang digunakan dalam penelitian ini sudah cukup representatif dalam menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

D. PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan pengujian dari pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten dalam rentang waktu 2020-2024. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, analisis dilakukan dengan analisis regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Pemilihan model ini didasarkan pada hasil uji Chow dan uji Hausman untuk memastikan model yang paling sesuai. Setelah model ditentukan, penelitian dilanjutkan dengan serangkaian uji seperti uji asumsi klasik, uji hipotesis, serta analisis determinasi. Maka selanjutnya akan ditelaah lebih lanjut mengenai pengaruh dari masing-masing variabel yakni sebagai berikut:

1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten

Hasil estimasi regresi dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten/Kota Provinsi Banten selama periode 2020–2024. Koefisien negatif menunjukkan arah hubungan yang sesuai dengan teori, yaitu semakin tinggi IPM, maka semakin rendah tingkat pengangguran. Namun, hasil yang tidak signifikan secara statistik menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak cukup kuat secara data untuk disimpulkan sebagai hubungan yang konsisten dalam konteks penelitian ini. Dimana peningkatan IPM tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk menurunkan TPT dalam periode dan wilayah penelitian ini.

Secara teoritis, hasil ini konsisten dengan teori modal manusia (*human capital theory*) yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak akan meningkatkan produktivitas dan peluang kerja, sehingga dapat menurunkan pengangguran. Namun, tidak signifikannya pengaruh IPM dalam konteks Banten dapat dijelaskan oleh beberapa hal:

a. Mismatch antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja

Meskipun nilai IPM meningkat, peningkatan tersebut belum tentu mencerminkan peningkatan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal. Artinya keterampilan yang dimiliki oleh Angkatan kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

b. Ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah

Kenaikan IPM lebih menonjol di wilayah perkotaan atau wilayah dengan akses layanan publik yang baik, sementara wilayah lain tetap tertinggal. Akibatnya, peningkatan IPM secara agregat belum mampu menurunkan pengangguran secara merata.

c. Peningkatan pendidikan tidak selalu diikuti dengan tersedianya lapangan kerja yang memadai

Peningkatan IPM, khususnya dalam aspek pendidikan, bisa mendorong ekspektasi kerja yang lebih tinggi. Namun, ketika pasar kerja tidak mampu menyediakan pekerjaan yang sesuai, maka pengangguran tetap tinggi, terutama pengangguran terdidik.

d. Dominasi sektor informal

Sebagian besar pertumbuhan lapangan kerja di wilayah ini berada di sektor informal yang kurang stabil dan tidak selalu tercermin dalam penurunan TPT secara resmi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Marliana (2022) yang menunjukkan bahwa secara parsial, IPM berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Meskipun IPM mengalami peningkatan, pengaruhnya terhadap pengurangan pengangguran tidak selalu langsung terasa, terutama jika tidak diikuti dengan pertumbuhan kesempatan kerja atau keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar.

Demikian pula, penelitian Ambarini & Karmini (2022) yang dilakukan di Provinsi Bali juga menyimpulkan bahwa IPM memiliki hubungan negatif terhadap pengangguran, namun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Hal ini memperkuat argumen bahwa

peningkatan IPM harus disertai dengan kebijakan pendukung, seperti pelatihan kerja, investasi di sektor padat karya, dan penciptaan lapangan kerja inklusif agar efeknya lebih optimal dalam menurunkan pengangguran.

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten

Berdasarkan hasil estimasi model regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM), ditemukan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten/Kota Provinsi Banten selama periode 2020–2024. Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka semakin rendah tingkat pengangguran terbuka yang terjadi di wilayah tersebut.

Hasil ini secara empiris mendukung teori Keynesian yang menyatakan bahwa peningkatan permintaan agregat, yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi, akan mendorong peningkatan output dan penciptaan lapangan kerja baru. Ketika sektor-sektor ekonomi mengalami ekspansi, perusahaan membutuhkan tambahan tenaga kerja untuk memenuhi peningkatan permintaan barang dan jasa. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi faktor krusial dalam menurunkan angka pengangguran.

Secara khusus, di wilayah Provinsi Banten, meskipun terdapat dinamika dan variasi pertumbuhan antar daerah, secara umum tren pertumbuhan PDRB menunjukkan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Perbaikan kondisi ekonomi ini tampaknya telah memberikan efek positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan Hukum Okun yang menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Ketika PDRB meningkat, maka aktivitas

produksi dan permintaan tenaga kerja ikut meningkat, sehingga tingkat pengangguran cenderung menurun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Marliana (2022), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Artinya, semakin kuat kinerja ekonomi suatu daerah, semakin besar kemungkinannya untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

Temuan ini juga didukung oleh penelitian Ambarini & Karmini (2022), yang meneliti kabupaten/kota di Provinsi Bali dan menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan ekonomi daerah berperan penting dalam menekan angka pengangguran, terutama jika pertumbuhan tersebut terjadi di sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja seperti industri, perdagangan, dan pariwisata.

Selain itu, terdapat temuan dari Hasim & A'yun (2025) yang berbeda dengan hasil penelitian ini. Mereka menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak signifikan dalam menurunkan pengangguran di wilayah yang diteliti. Bahkan dalam beberapa kasus, pertumbuhan yang terjadi justru disertai dengan peningkatan pengangguran. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan yang bersumber dari sektor padat modal yang minim menyerap tenaga kerja.

3. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten

Hasil regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) menunjukkan bahwa variabel upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada periode 2020–2024. Koefisien negatif menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum cenderung menurunkan tingkat pengangguran terbuka, dan signifikansi statistik

mengindikasikan bahwa pengaruh tersebut konsisten dan dapat dipercaya secara empiris.

Temuan ini memberikan gambaran bahwa kebijakan upah minimum di wilayah Banten berperan positif dalam mendorong penyerapan tenaga kerja. Hasil ini sejalan dengan teori upah efisiensi (*efficiency wage theory*) yang menyatakan bahwa upah yang lebih tinggi mampu meningkatkan produktivitas pekerja, mengurangi turnover karyawan, dan memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik. Dalam konteks ini, pemberian upah layak mendorong peningkatan produktivitas dan dapat berdampak positif pada stabilitas dan pertumbuhan sektor usaha, yang pada akhirnya memperluas kesempatan kerja.

Hasil ini juga mencerminkan bahwa kenaikan upah minimum tidak serta-merta menyebabkan peningkatan pengangguran, sebagaimana dikemukakan dalam teori klasik, yang menyatakan bahwa upah minimum yang terlalu tinggi dapat menciptakan surplus tenaga kerja. Sebaliknya, pada kasus di Banten, hasil justru menunjukkan bahwa peningkatan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) cenderung mengurangi pengangguran terbuka.

Selain itu, temuan ini juga konsisten dengan teori keynes, yang menyatakan bahwa pengangguran bukan hanya disebabkan oleh kekakuan upah atau kegagalan pasar tenaga kerja, melainkan karena permintaan agregat yang rendah, terutama konsumsi masyarakat. Ketika upah minimum meningkat, pendapatan riil rumah tangga meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan konsumsi. Karena konsumsi merupakan komponen utama permintaan agregat, maka permintaan terhadap barang dan jasa pun meningkat. Dalam kondisi ini, pelaku usaha akan meningkatkan produksi dan mulai menyerap lebih banyak tenaga kerja. Maka, kenaikan upah tidak menyebabkan pengangguran, justru mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Marliana (2022) yang menunjukkan bahwa upah minimum secara parsial berpengaruh negatif

dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Begitu pula Ambarini & Karmini (2022) yang menemukan bahwa meskipun pada beberapa wilayah terdapat variasi efek, secara umum upah minimum mampu berperan dalam menurunkan pengangguran, khususnya di sektor formal yang berkembang.

Dengan demikian, peran upah minimum di Banten terbukti sebagai alat kebijakan ketenagakerjaan yang efektif dalam menekan tingkat pengangguran. Kebijakan ini tidak hanya melindungi pekerja dari eksploitasi upah rendah, tetapi juga mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif dan memperkuat daya saing tenaga kerja lokal. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada struktur ekonomi daerah, kapasitas industri, serta integrasi antara kebijakan upah, pelatihan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

4. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Secara Simultan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten

Berdasarkan hasil uji F dalam model regresi data panel menggunakan pendekatan Fixed Effect Model (FEM), diperoleh bahwa secara simultan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2020–2024. Signifikansi ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama dapat menjelaskan variasi dalam tingkat pengangguran terbuka di wilayah yang diteliti.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa pengangguran terbuka merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu faktor saja. Kualitas sumber daya manusia (IPM), dinamika pertumbuhan ekonomi, serta kebijakan pengupahan semuanya saling memengaruhi dan membentuk kondisi pasar tenaga kerja di suatu wilayah.

Penjelasan dari kontribusi simultan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berperan dalam membentuk kualitas tenaga kerja, meskipun pengaruh parsialnya tidak signifikan, secara bersama-sama IPM tetap penting dalam membangun pondasi produktivitas tenaga kerja jangka panjang. Kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak merupakan modal dasar untuk menciptakan tenaga kerja yang kompetitif dan siap pakai.
- b. Pertumbuhan Ekonomi menjadi motor utama penciptaan lapangan kerja baru. Ketika perekonomian tumbuh, sektor-sektor usaha berkembang dan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Ini sejalan dengan teori Keynes dan Hukum Okun yang menekankan peran pertumbuhan output terhadap penyerapan tenaga kerja.
- c. Upah Minimum sebagai bentuk intervensi pemerintah memiliki dampak signifikan dalam mendorong daya beli, menciptakan permintaan, dan secara tidak langsung memengaruhi peluang kerja. Upah yang layak dapat mendorong produktivitas dan stabilitas tenaga kerja.

Interaksi antara ketiga variabel ini menciptakan efek sinergis terhadap pengangguran terbuka. Misalnya, peningkatan IPM yang dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan kebijakan upah yang mendukung, akan jauh lebih efektif dalam menurunkan pengangguran daripada hanya mengandalkan salah satu aspek saja.

Secara kebijakan, temuan ini menegaskan bahwa penanganan pengangguran terbuka di Provinsi Banten harus dilakukan melalui pendekatan komprehensif dan terintegrasi, meliputi: Investasi berkelanjutan dalam pendidikan dan kesehatan, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sektor padat karya dan UMKM, serta penetapan upah minimum yang adaptif terhadap kondisi ekonomi dan sosial di masing-masing daerah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM), maka dapat disimpulkan bahwa:

1. IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap TPT. Secara arah hubungan, peningkatan IPM cenderung menurunkan pengangguran, namun pengaruh tersebut belum cukup kuat secara statistik, kemungkinan disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap TPT. Ini berarti bahwa peningkatan aktivitas ekonomi daerah, terutama melalui PDRB, mampu menciptakan lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja secara nyata, sehingga berdampak langsung terhadap penurunan tingkat pengangguran.
3. Upah minimum juga berpengaruh signifikan terhadap TPT. Kenaikan upah minimum yang memadai tidak hanya menjamin kesejahteraan pekerja, tetapi juga mendorong konsumsi dan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya menekan angka pengangguran, terutama di wilayah industri, terutama di wilayah-wilayah dengan sektor industri aktif.
4. Secara simultan, ketiga variabel independen (IPM, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Ini mengindikasikan bahwa persoalan pengangguran merupakan hasil dari kombinasi antara kualitas tenaga kerja, dinamika ekonomi, dan kebijakan ketenagakerjaan yang berlaku di masing-masing daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka secara efektif, diperlukan kebijakan pembangunan daerah yang menyeluruh dan terintegrasi, meliputi peningkatan kualitas SDM yang relevan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan padat karya, serta penetapan upah minimum yang adaptif terhadap kondisi lokal

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang komprehensif dan terintegrasi, dengan mempertimbangkan keterkaitan antara kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pengupahan. Program peningkatan IPM perlu diarahkan pada penguatan pendidikan vokasional dan pelatihan kerja berbasis industri lokal. Selain itu, pertumbuhan ekonomi harus difokuskan pada sektor-sektor padat karya dan UMKM yang terbukti mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Penetapan upah minimum juga perlu dilakukan secara adaptif, sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial daerah, serta diimbangi dengan pengawasan implementasi yang efektif. Pemerintah juga disarankan untuk mengembangkan basis data ketenagakerjaan yang akurat dan saling terhubung guna mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran

2. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada tiga variabel, yakni IPM, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memasukkan variabel tambahan seperti investasi, pengeluaran pemerintah, urbanisasi, jumlah angkatan kerja, dan tingkat partisipasi kerja, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengangguran terbuka.

3. Bagi Masyarakat dan Pencari Kerja

Masyarakat, khususnya angkatan kerja usia produktif, Diharapkan dapat terus meningkatkan kompetensi diri, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan keterampilan, agar lebih adaptif terhadap perubahan pasar kerja dan memiliki daya saing tinggi di era ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., & Hasda, S. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Penerit Muhammad Zani.
- Adriani, E. (2019). Pengukuran Modal Manusia (Suatu Studi Literatur). *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 4(1), 176–183.
<https://doi.org/10.33087/jmas.v4i1.86>
- Afrizal, M. F. R., & Hasmarini, M. I. (2024). Analisis Pengaruh Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 9257–9268.
- Agusalim, L., & Novianti, T. (2023). Pembuktian Empiris Teori Upah Efisiensi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 14(2), 121–135.
<https://doi.org/10.22212/jekp.v14i2.2951>
- Ambarini, N. K. D., & Karmini, N. L. (2022). Analisis Pengaruh IPM, Upah Minimum, dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 11(09), 3631–3647.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. CV Jejak.
- Arifin, S., & Firmansyah. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengangguran di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 7(2).
<https://doi.org/10.35448/jequ.v7i2.4978>
- Astari, M., Hamzah, L. M., & Ratih, A. (2019). Hukum OKUN Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran di Indonesia. *JEP: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 67–80.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Booklet Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banteng.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2021*. Badan Pusat Statistik.
- Badawi, A., Supardi, Jacob, J., & Kadarisman, S. (2022). *Riset Terapan Dengan Aplikasi Statistika*. Widina Media Utama.

- Badria, F. A. (2021). *Minimum Terhadap Pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Partisipan Angkatan Kerja, dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran di Indonesia Tahun 2011-2020* [Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi Dengan Penggunaan Eviews)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2023). *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews)*. Rajawali Pers.
- Becker, G. S. (1962). Investment In Human Capital: A Theoretical Analysis. *The Journal of Political Economy*, LXX(5), 9–49.
- Djaali. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT Bumi Aksara.
- Efendi, B., Nasution, D. P., Rusiadi, & Pratiwi, D. (2024). *Teori Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi*. Tahra Media Group.
- Elmizan, G. H., & Asy;ari. (2021). *Ekonomi Makro*. IAIN Bukittinggi.
- Evienia, B., Aldi, B. E., & Madhyaratri, A. (2014). Pandangan Pelaku Pendidikan di Universitas Terhadap Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean 2015. *Bina Ekonomi: Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar*, 18(2), 105–116.
- Fadli, Z., Siagian, A. O., Siregar, N., Amelia, D., & Januardani, F. D. (2023). *Ekonomi Makro: Teori-Teori Pengantar*. CV. Gita Lentera.
- Ghazaly, H., & Gunadi, E. (2021). *Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2020*. Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan.
- Hasim, & A'yun, Q. I. (2025). Pengaruh PDRB, IPM Jumlah Penduduk dan UMK Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(6), 395–398. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14799853>
- Herawati, A., & Oktavianoor, H. (2022). *Buku Pengantar Demografi*. Pt Nasya Expanding Management (NEM).
- Hermawan, A. (2015). *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. PT Grasindo.

- Intan, N. (2021). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Sulawesi Selatan* [Skripsi]. UIN Alauddin Makassar.
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Macmillan Cambridge University Press.
- Kurniawan. (2019). *Analisis Data Menggunakan Stata SE 14 (Panduan Analisis, Langkah Lebih Cepat, Lebih Mudah dan Paling Praktis)*. Deepublish Publisher.
- Kusumanegara, I. K. A., & Karmini, N. L. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali. *JAKA: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing*, 3(2), 344–357.
- Kusumaningtyas, E., Sugiyanto, Subagyo, E., & Adinugroho, W. C. (2022). *Konsep dan Praktik Ekonometrika Menggunakan Eviews*. Academia Publication.
- Madinah, T. M., & Suparintina, L. (2025). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten Menurut Lapangan Usaha-2020-2024* (Vol. 24). Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
- Mankiw, N. G. (2009). *Macroeconomics* (7th ed.). Worth Publishers.
- Marbun, R. (2017). *Petunjuk Pratikum Analisis Data Dengan Aplikasi Eviews 9*. Laboratorium Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen.
- Marliana, L. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 87–91. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.490>
- Masdiantini, P. R., Ermanda, A. P., Devi, S., & Santi, N. W. A. (2024). *Buku Ajar Pengantar Ekonomi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Misbahuddin & Hasan, I. (2013). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik (Edisi Kedua)*. Bumi Aksara
- Neno, R. A., Saleh, S. E., Dai, S. I. S., & Mulyati, Y. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat

- Pengangguran Terbuka di Kawasan Teluk Tomini 2017-2021. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Pembangunan (JSEP)*, 1(3), 84–101.
- Ningsi, M. N. (2023). *Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Upah Minimum Regional (UMR) Terhadap Pengangguran di Provinsi Aceh* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Nugroho, A., Clarissa, A., Prihatinningsih, D. R., Wahyudi, D., Kurniati, E., & Arsyi, F. A. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia 2024* (Vol. 19). Badan Pusat Statistik.
- Nugroho, M. A. (2022). *Implementasi Hukum Okun di Indonesia: Hubungan Pertumbuhan ekonomi dan Pengangguran Tahun 1984-2022* [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia.
- Nurfardhan, M. R., Firdaus, R. A., Prastiya, Y., Wibowo, R. P., & Farliana, N. (2025). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Semarang Tahun 2017-2023. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(2), 1104–1115. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i2.26076>
- Nurlan, F. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. CV Pilar Nusantara.
- Okun, A. M. (1962). Potential GNP: Its Measurement and Significance. *Cowles Foundation for Research in Economics at Yale University*.
- Palindangan, J., & Bakar, A. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 5(1), 65–80.
- Panjawa, J. L., & Sugiarti, RR. R. (2020). *Pengantar Ekonometrika Dasar Teori dan Aplikasi Praktis Untuk Sosial-Ekonomi*. Pustaka Rumah C1nta.
- Pasaribu, R. B. F. (2014). *Teori Ekonomi II: Teori Ekonomi Klasik Versus Teori Ekonomi Keynesian*. Universitas Gunadarma.
- Priyatno, D. (2022). *Olah Data Sendiri Analisis Regresi Linear Dengan SPSS dan Analisis Regresi Data Panel Dengan Eviews*. Cahaya Harapan.
- Priyono, & Ismail, Z. (2012). *Teori Ekonomi*. Dharma Ilmu.
- Purnami, I. (2015). *Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerjadi Provinsi*

Jawa Barat Tahun 2010-2013 [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Putri, A., & Rusdi, M. (2025). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Sumatera. *Jurnal Darma Agung*, 33(1), 171–180. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v33i1.5376>
- Putri, D., Wijaya, S. E., Sofiah, Aini, Q., & Ulum, B. (2024). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Pendidikan (Jamapedik)*, 1(2), 316–325.
- Qausar, najasyi, & Aminda, R. S. (2022). Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau. *Journal Of Development Economic and Digitalization*, 1(1), 38–50.
- Rahman, A., Sari, N. M. W., Fitriani, Sugiarto, M., Sattar, & Abidin Zainal. (2022). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Restianjani, A. A., & Widyawati, R. F. (2025). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Penanaman Modal Negeri terhadap Pengangguran Di Indonesia Tahun 2015-2022. *Economie*, 07(1).
- Ridwan, & Nawir, I. S. (2021). *Buku Ekonomi Publik*. Pustaka Pelajar.
- Sa'adah, L., & Nur'ainui, T. (2020). *Implementasi Pengukuran Current Ratio, Debt To Equity Ratio dan Return On Equity serta Pengaruhnya Terhadap Return*. LPPM Universitas KH.A. Wahab Hasbullah.
- Sa'diah, & Larasati, D. (2025). *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten 2024* (Vol. 20). Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
- Saputri, S., & Yefriza. (2025). Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Darma Agung*, 33(1), 181–192. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v33i1.4836>
- Sari, Y. K., & Rizkiyan, A. (2024). Pengangguran dalam Perspektif Islam. *EKSAP: Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak*, 1(3), 90–100. <https://doi.org/10.61132/eksap.v1i2.185>

- Sarwono, J. (2016). *Prosedur-Prosedur Analisis Populer Aplikasi Riset Skripsi dan Tesis dengan Eviews*. Gava Media.
- Siagian, N., & Silviani, I. (2023). *Metodologi Kuantitatif*. Scopindo Media Pustaka.
- Solihah, N., & Arisetyawan, K. (2025). Pengaruh Upah, Angkatan Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Barat. *Independent: Journal of Economics*, 5(1), 79–90.
- Sudaryana, B., & Agusiady, H. R. R. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Deepublish.
- Suharnanik. (2023). *Buku Ajar Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran*. UWKS Prees.
- Suparmono. (2018). *Buku Pengantar Ekonomi Makro: Teori, Soal, dan Penyelesaian*. UPP STIM YKPN.
- Tohardi, A. (2019). *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial*. Tanjungpura University Press.
- Tumanggor, L. R., & Rahmawan, U. E. (2024). *Metadata Indikator Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Umamah, R., & Syafitri, F. (2025). Analisis Pengaruh Pengangguran, Gini Rasio, dan Jumlah Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. *Jurnal of Development Economic and Digitalization*, 4(5), 122–134.
- Umam, C. (2022). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Banten (2010-2020) [Skripsi]*. Universitas Islam Indonesia.
- Wairooy, F. A., & Haryono, S. (2023). Pengaruh Foreign Direct Investment, Inflasi, dan Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan dengan Corruption Perception Index sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 2(1), 37–50. <https://doi.org/10.14421/jmes.2023.021-03>
- Wijaya, E., Suprayitno, D., Ladini, U., Nengsih, T. A., Sumiyarti, Sudrimo, S. N., Kusumastuti, S. Y., Nurhayati, & Hulu, D. (2024). *Buku Ajar Ekonometrika*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Wulandari, F., Fadilla, N., & Wulandari, D. T. (2024). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2023. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 5(1), 128–139. <https://doi.org/10.21107/bep.v5i1.25938>
- Yanti, N., Nurtati, & Misharni. (2020). Investasi Modal Manusia Bidang Pendidikan: Dampak Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(1), 21–37.